



**PENGARUH *REFOCUSING* ANGGARAN DAN TINGKAT
KEMANDIRIAN DAERAH TERHADAP TINGKAT
EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH SELAMA PANDEMI COVID-19 DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh

Salung Sheva Ramanthania

200810301093

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
S1 AKUNTANSI
2023**



**PENGARUH *REFOCUSING* ANGGARAN DAN TINGKAT
KEMANDIRIAN DAERAH TERHADAP TINGKAT
EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH SELAMA PANDEMI COVID-19 DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan
Program Studi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

Salung Sheva Ramanthania

200810301093

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
S1 AKUNTANSI
2023**

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji Syukur kepada Allah SWT atas segala karuniaNya, penulis ingin mempersembahkan skripsi ini sebagai bentuk penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya untuk :

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Astotok dan Ibu Titik Waminingsih yang telah memberikan doa dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
2. Eyang uti dan Alm.Eyang Kakung saya, yaitu Ibu Senipah dan Alm. Bapak Subandi yang telah memberikan semangat dan dukungan terbaik dalam akademik;
3. Seluruh keluarga besar saya yang selalu mendoakan yang terbaik hingga saat ini;
4. Dosen Pembimbing penulis yaitu Ibu Andriana, S.E., M.Sc., Ak dan Ibu Oktaviani Ari Wardhaningrum, S.E., M.Sc. yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan memberikan banyak ilmu dalam membimbing skripsi selama ini;
5. Almamater tercinta Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja kertas (untuk urusan yang lain)”

(Q.S. Al-Insyirah : 6-7)

“Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi seringkali ketakutanlah yang membuat jadi sulit. Jadi, jangan mudah menyerah”

(Joko Widodo)

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories* nya. Berjuanglah untuk diri sendiri. Walaupun tidak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita di masa depan akan bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap berjuang ya!”

(Fardiyandi)

“Everything that has begun, must end”

(Salung Sheva Ramanthania)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salung Sheva Ramanthania

NIM : 200810301093

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “PENGARUH *REFOCUSING* ANGGARAN DAN TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH TERHADAP TINGKAT EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SELAMA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 08 November 2023



Salung Sheva Ramanthania

NIM. 200810301093

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul *Pengaruh Refocusing Anggaran dan Tingkat Kemandirian Daerah Terhadap Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia* telah diuji dan disetujui oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember pada :

Hari : Senin
Tanggal : 04 Desember 2023
Tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Pembimbing

1. Pembimbing Utama

Nama : Andriana, S.E., M.Sc., Ak

NIP : 198209292010122002

2. Pembimbing Anggota

Nama : Oktaviani Ari Wardhaningrum, S.E., M.Sc

NIP : 99210202023212051

Penguji

1. Penguji Utama

Nama : Dr. Hendrawan Santosa Putra, S.E., M.Si., Ak.

NIP : 197405062002121006

2. Penguji Anggota

Nama : Drs. Sudarno, M.Si., Ak, CA, CSRS, CSRA

NIP : 196012251989021001

Tanda Tangan

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Salung Sheva Ramanthania

Program Studi SI Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Adanya pandemi covid-19 di Indonesia berdampak pada munculnya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dan kondisi keuangan di pemerintah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh *refocusing* anggaran dan tingkat kemandirian daerah terhadap tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia selama pandemi Covid-19 pada tahun 2019-2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari situs *web* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Indonesia. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *multistage cluster random sampling* dengan populasi penelitiannya seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 896 data pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2019-2022. Penelitian ini menggunakan 3 proksi untuk mengukur pengaruh variabel *refocusing* anggaran, yaitu proksi perubahan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Refocusing* anggaran dengan proksi perubahan anggaran pendapatan dan perubahan anggaran belanja berpengaruh terhadap tingkat efisiensi pengelolaan keuangan. Namun, *refocusing* anggaran dengan proksi perubahan pembiayaan tidak berpengaruh terhadap efisiensi pengelolaan keuangan. Sedangkan tingkat kemandirian daerah berpengaruh terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci : *Refocusing*, Tingkat Kemandirian, Efisiensi Pengelolaan keuangan, Pandemi Covid-19

RINGKASAN

PENGARUH REFOCUSING ANGGARAN DAN TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH TERHADAP TINGKAT EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SELAMA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA; Salung Sheva Ramanthania; 200810301093; 2023; 81 halaman; Program Studi S1 Akuntansi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Universitas Jember.

Refocusing anggaran merupakan kebijakan untuk memfokuskan dan memusatkan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya belum dianggarkan melalui perubahan anggaran. *Refocusing* anggaran dilakukan untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia dengan melakukan perubahan anggaran. *Refocusing* anggaran diukur dengan menggunakan tiga proksi yaitu perubahan anggaran pendapatan, perubahan anggaran belanja, dan perubahan anggaran pembiayaan.

Tingkat kemandirian daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai aktivitas daerahnya sendiri sebagai indikator pembangunan daerah, perkembangan ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemandirian daerah dapat digunakan untuk mengukur pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia salah satunya tingkat efisiensinya. Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah merupakan kemampuan suatu daerah untuk mengelola keuangan daerahnya agar tepat guna.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis regresi linier berganda dengan melakukan pengujian asumsi klasik, kelayakan model, dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *refocusing* anggaran dengan proksi perubahan anggaran pendapatan dan perubahan anggaran belanja berpengaruh terhadap tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah, namun *refocusing* anggaran dengan proksi perubahan pembiayaan tidak berpengaruh terhadap tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan, tingkat kemandirian daerah berpengaruh terhadap tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, hidayah, serta karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh *refocusing* Anggaran dan Tingkat Kemandirian Daerah Terhadap Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pendidikan program studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan penulis, tetapi atas dukungan dari berbagai pihak, penulis mampu menuntaskan skripsi ini dengan baik. Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, diantaranya :

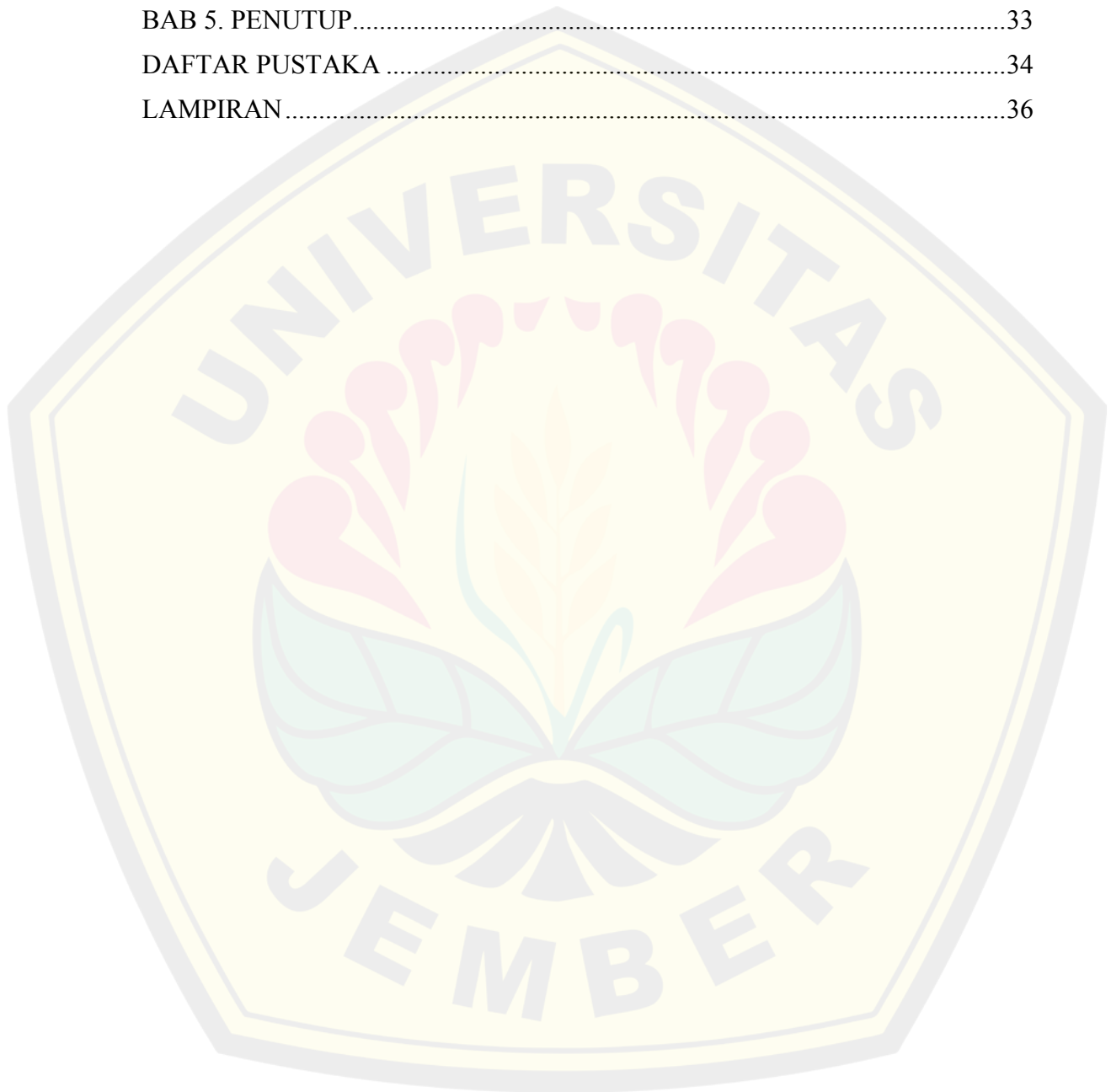
1. Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Dr. Yosefa Sayekti, S.E., M.Com. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Ibu Andriana, S.E., M.Sc., Ak. dan Ibu Oktaviani Ari Wardhaningrum S.E., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing skripsi penulis dengan penuh perhatian dan rasa tanggung jawab tinggi;
5. Bapak Dr. Hendrawan Santosa Putra, S.E, M.Si, Ak dan Drs. Sudarno, M.Si, Ak, CA selaku Dosen Penguji;
6. Drs. Rochman Effendi selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa;

7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran baru bagi penulis;
8. Kedua orang tua tercinta saya, yaitu Bapak Astotok dan Ibu Titik Waminingsih yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
9. Eyang Utu dan Alm. Eyang Kakung penulis yang telah memberikan dukungan dan doa bagi penulis;
10. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HMJA) tahun 2021 dan 2022 yang telah memberikan banyak dukungan, pembelajaran, dan wawasan baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
11. Teman-teman “*Idiot Sisters*” yaitu Epi, Astrid, Galuh, Hilda, dan Prisca yang telah memberikan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi;
12. Kakak Regita Desta, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi;
13. Teman-teman seperjuangan SMA (Bernika, Yulia, Sabila, Paksi, Eggy, Sulthon, dan Doping) yang telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis;
14. Teman-teman seperjuangan S1 Akuntansi Angkatan 2020;
15. Semua pihak yang terlibat yang tidak bisa penulis sebutkan keseluruhan;
16. Terima kasih, untuk pemilik nama Alfi Dwi Primawan, atas kesabaran, dukungan, ketelatenan, dan tenaga yang telah diberikan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi;
17. Terima kasih, untuk pemilik NIM 200810301093 atas kesabaran, ketelatenan, dan semangat yang kuat sampai di titik ini, yaitu diri saya sendiri.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
RINGKASAN.....	vii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Teori Stewardship.....	5
2.2 Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD).....	5
2.3 <i>Refocusing</i> Anggaran.....	6
2.4 Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah.....	7
2.5 Penelitian Terdahulu.....	8
2.6 Kerangka Konseptual.....	9
2.7 Hipotesis Penelitian.....	10
2.7.1 Pengaruh <i>Refocusing</i> Anggaran terhadap Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	10
2.7.1 Pengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan terhadap Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	11
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	12
3.1 Populasi dan Sampel.....	12
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	13

3.3 Analisis Data	14
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	16
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	16
4.2 Hasil Uji Analisis Data.....	18
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	28
BAB 5. PENUTUP.....	33
DAFTAR PUSTAKA	34
LAMPIRAN.....	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual9



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	13
Tabel 4.1 Sebaran Sampel Pemerintah Daerah	16
Tabel 4.2 Tabel Hasil Uji Analisis Deskriptif Proksi Pertama	18
Tabel 4.2 Tabel Hasil Uji Analisis Deskriptif Proksi Pertama	18
Tabel 4.3 Tabel Hasil Uji Analisis Deskriptif Proksi Kedua	19
Tabel 4.4 Tabel Hasil Uji Analisis Deskriptif Proksi Ketiga.....	19
Tabel 4.5 Tabel Hasil Uji Analisis Deskriptif X_2	20
Tabel 4.6 Tabel Hasil Uji Analisis Deskriptif Y	20
Tabel 4.7 Tabel Hasil Uji Normalitas	21
Tabel 4.8 Tabel Hasil Uji Multikolinearitas	22
Tabel 4.9 Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas	23
Tabel 4.10 Tabel Hasil Uji Autokorelasi	23
Tabel 4.11 Tabel Hasil Uji F.....	24
Tabel 4.12 Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	25
Tabel 4.13 Tabel Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	26
Tabel 4.14 Tabel Hasil Uji t.....	27

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi COVID-19 di Indonesia memicu perubahan besar dalam seluruh sektor kehidupan terutama pada sektor perekonomian. Pandemi ini mulanya terjadi di Kota Wuhan pada 2019 dan pada awal 2020 telah meluas ke Indonesia. Pandemi COVID-19 telah memaksa pemerintah untuk menangani masalah ekonomi sebagai akibat alokasi anggaran negara yang cukup besar untuk menangani COVID-19. Perekonomian di Indonesia menurut data World Bank dalam *Global Economic Prospect* pada Januari 2021 mengalami penurunan dari 6,1% menjadi 4,6%. Selain itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 yang beriringan dengan fokus pemerintah untuk layanan kesehatan (World Bank, 2022).

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah disetujui dan ditetapkan sebagai kebijakan daerah oleh pimpinan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur pemerintahannya yang dikenal sebagai hak otonomi daerah. Peraturan tersebut dijadikan dasar pemerintah daerah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintahan yang telah tercantum dalam APBD. APBD merupakan rencana anggaran yang meliputi beberapa hal yang diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Tidak Terduga (BTT), dan pemanfaatan dana kas yang terdiri dari dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah (Pasal 13 Keppres No.9, 2020).

Adanya pandemi Covid-19 mendorong pemerintah untuk melaksanakan kebijakan anggaran keuangan daerah yang difokuskan untuk mempercepat penanganan Covid-19. Adanya kebijakan tersebut dilakukan untuk pengelolaan keuangan daerah tetap stabil dan efisien. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan mengoptimalkan kebijakan *refocusing* anggaran dengan mendorong Kepala Daerah untuk menyesuaikan target pendapatan dan belanja daerah untuk

prioritas penanganan Covid-19 (Kepmendagri Nomor 119, 2020). Penyesuaian target pendapatan dilakukan dengan menyesuaikan target pendapatan transfer ke daerah berdasarkan alokasi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan. Penyesuaian lain yang dilakukan yaitu menyesuaikan PAD dengan memperkirakan asumsi makro yang diakibatkan oleh penurunan kegiatan perekonomian. Selain itu, penyesuaian target belanja daerah dilakukan dengan menyesuaikan rasionalisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% (Peraturan Mendagri, 2020).

Kebijakan *refocusing* anggaran difokuskan untuk mendanai prioritas-prioritas penanganan Covid-19. Prioritas yang didanai diantaranya belanja bidang kesehatan, belanja penyediaan pengamanan sosial, dan penanganan dampak ekonomi yang terkait dengan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah untuk memulihkan perekonomian daerah. Selain itu, *refocusing* anggaran juga dilakukan dengan mengalihkan penggunaan anggaran honorarium, bantuan sosial, dan hibah pada kelompok masyarakat untuk menjadi anggaran bantuan sosial pada rakyat miskin yang terdampak pandemi Covid-19 dengan mempertimbangkan pelaksanaan bantuan Pemerintah Pusat. *Refocusing* anggaran dapat diukur dengan menggunakan beberapa proksi di antaranya perubahan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Keberhasilan pengelolaan anggaran dapat diukur dengan adanya kinerja keuangan pemerintah daerah (Indriani, 2021). Adanya *refocusing* anggaran yang dilakukan dapat menggambarkan kondisi keuangan di semua pemerintah daerah di Indonesia. *Refocusing* anggaran dapat diukur dengan menggunakan tiga pengukuran, yaitu perubahan anggaran pendapatan, perubahan anggaran belanja, dan perubahan anggaran pembiayaan (BPS, 2021). Pengukuran *refocusing* anggaran dilakukan dengan memperhatikan struktur APBD Pemerintah Daerah yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Selain itu, keberhasilan pengelolaan anggaran dapat dilihat dari tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah saat itu. Tahun 2021, rata-rata tingkat kemandirian pemerintah kabupaten/kota masih dalam kategori rendah disebabkan masih bergantung pada aliran dana dari pemerintah pusat dengan porsi 66% dari

total penerimaan daerah (BPS, 2021). Porsi pengeluaran daerah yang paling besar pada tahun 2021 adalah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Komposisi belanja pegawai pada tahun 2021 mencapai 33,8 dari total belanja daerah (BKN, 2021). Rendahnya tingkat kemandirian berhubungan dengan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan berhubungan dengan kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan pendapatan daerahnya. Apabila tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah baik maka berdampak pada tingkat kemandirian daerah yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerahnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Agnika *et al.*, (2021) di Kabupaten Subang menunjukkan rasio efisiensi pengelolaan keuangan mengalami kenaikan dan cukup efektif. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Amal & Wibowo (2022), menunjukkan bahwa rasio efisiensi perlu dilakukan optimalisasi dari sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. Keterbatasan penelitian sebelumnya terkait dengan topik yang dibahas adalah belum adanya penelitian yang meneliti di seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia sehingga hasil penelitian terdahulu belum bisa mewakili kondisi tingkat efisiensi pengelolaan keuangan keseluruhan pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian di atas, masih terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai tingkat efisiensi pengelolaan keuangan. Selain itu, pada awal tahun 2022 Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan *new normal* dan merubah pandemi menjadi endemi. Hal tersebut dapat memengaruhi tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan kebijakan tersebut. Adanya perubahan tersebut menarik untuk diteliti terkait dengan pengaruh *refocusing* anggaran dan tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah se-Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Apakah *refocusing* anggaran memengaruhi efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia?
2. Apakah tingkat kemandirian keuangan daerah memengaruhi efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis pengaruh *refocusing* anggaran terhadap efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kemandirian keuangan daerah terhadap efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Teoritis

Penelitian ini berguna sebagai sumber informasi atau bahan referensi terkait dengan pengaruh *refocusing* anggaran dan tingkat kemandirian daerah terhadap efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia

2. Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk manajemen kebijakan yang baik untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

- b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian di masa depan terkait dengan pengaruh *refocusing* anggaran dan tingkat kemandirian daerah terhadap tingkat efisiensi pengelolaan keuangan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*)

Penelitian ini didasari oleh teori *stewardship* yang dikembangkan oleh Donaldson dan Davis (1991). Teori *stewardship* menjelaskan terkait manajer yang bekerja sama untuk mencapai kesuksesan bersama dengan mengesampingkan kepentingan individu. Teori *stewardship* merupakan keadaan dimana para manajemen memiliki tujuan utama untuk kepentingan organisasi. Teori *stewardship* dapat diadopsi untuk sektor organisasi pemerintahan dan organisasi sektor publik lainnya (Rizal dan Hermanto, 2019).

Teori *stewardship* dapat diterapkan di sektor pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah mengutamakan kepentingan organisasi untuk keberhasilan tujuan bersama. Jika diibaratkan pemerintah daerah adalah *steward*, maka pemerintah daerah berupaya untuk memenuhi keinginan principal dan mementingkan tujuan bersama. Teori *stewardship* dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menerapkan analisis rasio terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah diterapkan (Halim, 2007).

2.2 Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD)

APBD merupakan rencana operasional keuangan pemerintah daerah terkait dengan target pengeluaran dan penerimaan daerah untuk pembiayaan aktivitas di pemerintah daerah (Halim & Kusufi, 2012). Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa APBD berisi terkait dengan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah disepakati oleh pemerintah daerah dan DPRD (Permendagri No.21, 2011). APBD memuat rencana pendapatan dan belanja daerah yang digunakan sebagai acuan dasar pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3 *Refocusing* Anggaran

Refocusing merupakan metode alternatif yang dilakukan untuk mengurangi peluang terjadinya resesi ekonomi untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional. *Refocusing* anggaran merupakan kebijakan untuk memfokuskan dan memusatkan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya belum dianggarkan melalui perubahan anggaran. *Refocusing* anggaran dilakukan untuk menjamin stabilitas keuangan negara karena adanya gejolak ekonomi global yang berdampak pada menurunnya sistem ekonomi nasional (Haikal & Fauzi, 2021). Kebijakan *refocusing* anggaran diterapkan di Indonesia dalam rangka mempercepat penanganan pandemi Covid-19.

Gejolak ekonomi secara global yang terjadi di Indonesia akibat pandemi tentunya berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi (Estaningrum *et al.*, 2022). Oleh karena itu, *refocusing* anggaran dapat mendorong stabilitas ekonomi nasional dengan meminimalisir adanya krisis ekonomi. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor S30/MK.02/2021 tentang *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021, *refocusing* anggaran dapat memudahkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pergeseran antar fungsi kegiatan untuk penanganan pandemi Covid-19. Peninjauan kembali alokasi anggaran pada pemerintah dapat dilakukan dengan melakukan perubahan anggaran pemerintah daerah. Perubahan anggaran dapat dilakukan dengan melakukan perubahan di anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Selain itu, keberhasilan kebijakan *refocusing* anggaran dapat diukur dengan meningkatnya efisiensi pengelolaan anggaran di pemerintahan daerah. Hal itu disebabkan oleh efisiensi pengelolaan anggaran yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah untuk mengalokasikan dananya pada keperluan daerah yang berhubungan dengan penanganan di masa pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 yang semakin melonjak dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait *refocusing* anggaran untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengalokasikan penggunaan

anggaran untuk kegiatan-kegiatan tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Hal itu disebabkan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat dari kegiatan sebelumnya lebih diprioritaskan (Yuniza *et al.*, 2022).

Pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan pandemi Covid-19 di lingkungan pemerintah diatur di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Instruksi Menteri Dalam Negeri terkait dengan pencegahan pandemi tersebut ditetapkan dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu, dasar lain yang digunakan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan dasar hukum tersebut, kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19 harus dilakukan dengan tepat dan terpadu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Gubernur, dan Bupati/Walikota di setiap daerah

2.4 Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah

Kemandirian keuangan pemerintah daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai aktivitas daerahnya sendiri sebagai indikator pembangunan daerah, perkembangan ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian keuangan pemerintah daerah digunakan untuk tingkat ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Hamzah, 2014). Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya melalui kinerja keuangan daerah. Tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah berguna untuk mengevaluasi kemampuan suatu daerah untuk menggunakan pengeluarannya sendiri sesuai dengan peraturan untuk membayar operasi pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah dihitung dengan membandingkan pendapatan asli daerah dari sumber-sumber seperti pinjaman, dana darurat, dana alokasi umum dan khusus, bagi hasil pajak dan bukan pajak, dengan pendapatan asli lokal dari sumber lokal (Mahmudi, 2016).

Sejauh mana pemerintah daerah bergantung pada pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pendapatan transfer) ditunjukkan oleh rasio kemandirian keuangan daerah. Rendahnya tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan dan pinjaman dari luar menunjukkan tingginya tingkat kemandirian daerah. Sejauh mana kabupaten dan kota berpartisipasi dan memberikan kontribusi untuk pembangunan daerah, seperti membayar pajak daerah dan retribusi, dapat ditentukan oleh rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah meningkat dengan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian Kadek & Indrawati (2019) terkait dengan perubahan anggaran terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sarbagita yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara perubahan anggaran terhadap efisiensi keuangan pemerintah daerah yang mengalami penurunan. Puspita *et al.*, (2022) melakukan penelitian terkait dengan kinerja keuangan Pemerintah Kota Batu sebelum dan saat pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Batu menunjukkan peningkatan dan dapat dikategorikan efisien namun tingkat kemandirian keuangan menunjukkan penurunan.

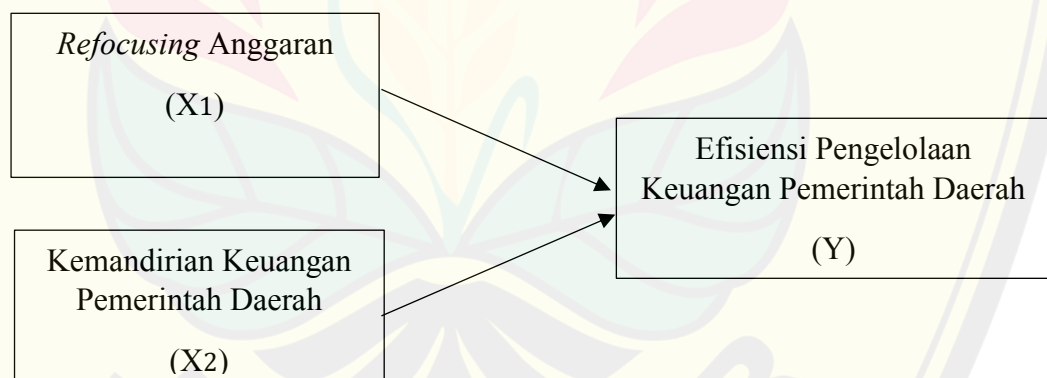
Penelitian Rheswari & Akbar (2022) membandingkan kinerja keuangan sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 di Kabupaten Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Gresik tergolong efisien. Hal ini didukung oleh Yuni *et al.*, (2022) melakukan penelitian terkait analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara pada masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan kemandirian keuangan pemerintah daerah baik sejalan dengan adanya perubahan anggaran.

Berdasarkan analisis kritis penelitian terdahulu, terdapat keterbatasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan tingkat efisiensi pengelolaan

keuangan pemerintah daerah di Indonesia saat pandemi Covid-19, yaitu penelitian sebelumnya belum menggunakan objek penelitian seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia yang merepresentasikan keseluruhan kondisi pemerintahan di Indonesia. Selain itu, variabel pada penelitian terdahulu belum menggunakan variabel yang fokus berhubungan dengan kebijakan *refocusing* anggaran yang diukur dengan menggunakan tiga proksi yaitu perubahan anggaran pendapatan, perubahan anggaran belanja, dan perubahan anggaran pembiayaan.

2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran terkait dengan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Penulis mengindikasikan analisis *refocusing* anggaran dan tingkat kemandirian daerah sebagai variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Pada penelitian ini, variabel independen *refocusing* anggaran diproksikan dengan menggunakan 3 proksi, perubahan anggaran pendapatan, perubahan anggaran belanja, dan perubahan anggaran pembiayaan sehingga menghasilkan 3 hipotesis pada variabel *refocusing* anggaran.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.7 Hipotesis Penelitian

2.7.1. Pengaruh Perubahan Anggaran Pendapatan terhadap Efisiensi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Perubahan anggaran pendapatan merupakan salah satu pengukuran *refocusing* anggaran yang dilakukan pemerintah daerah di Indonesia. *Refocusing* anggaran merupakan kebijakan yang dilakukan untuk mendorong perekonomian di Indonesia. *Refocusing* anggaran dapat diukur dengan perubahan anggaran pendapatan. Perubahan anggaran pendapatan yang dilakukan dapat berupa perubahan PAD, TKDD, dan pendapatan lainnya. Jika dikaitkan dengan teori *stewardship*, perubahan anggaran pendapatan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk pencapaian tujuan bersama yaitu keberhasilan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi perubahan anggaran pendapatan, maka dapat memengaruhi tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah

Syahara & Aufa (2022) menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pemerintah daerah mengalami peningkatan pada saat pandemi Covid-19. Peningkatan tersebut terjadi pada saat penerapan kebijakan *refocusing* anggaran yang diukur melalui perubahan anggaran pendapatan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H1 : *Refocusing* anggaran dengan perubahan anggaran pendapatan berpengaruh terhadap tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.

2.7.2. Pengaruh Perubahan Anggaran Belanja terhadap Efisiensi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Perubahan anggaran belanja merupakan salah satu pengukuran *refocusing* anggaran pada pemerintah daerah di Indonesia. Perubahan anggaran belanja dapat dilakukan pada belanja modal, belanja barang dan jasa, belanja pegawai, dan belanja lain-lain. Perubahan anggaran belanja jika dikaitkan dengan teori *stewardship* maka perubahan anggaran belanja harus dilakukan pemerintah daerah

untuk menghasilkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan yang baik pada suatu daerah. Perubahan anggaran belanja yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk mencapai keberhasilan bersama yaitu peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Soraida (2022) dan Karina & Wibowo (2022) menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pemerintah daerah mengalami perubahan yaitu adanya peningkatan pada saat pandemi Covid-19. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya kebijakan *refocusing* anggaran melalui perubahan anggaran yang dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H2 : *Refocusing* anggaran dengan perubahan anggaran belanja berpengaruh terhadap tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia

2.7.3. Pengaruh Perubahan Anggaran Pembiayaan terhadap Efisiensi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Perubahan anggaran pembiayaan merupakan salah satu pengukuran *refocusing* anggaran pemerintah daerah. Perubahan anggaran pembiayaan meliputi perubahan anggaran penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Perubahan anggaran pembiayaan jika dikaitkan dengan teori *stewardship* maka perubahan pembiayaan yang dilakukan merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah sebagai keberhasilan bersama.

Karina & Wibowo (2022) menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah mengalami peningkatan pada tahun 2020-2021. Peningkatan tersebut terjadi pada saat penerapan kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 dengan melakukan penyesuaian anggaran. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H3 : *Refocusing* anggaran dengan perubahan anggaran pembiayaan berpengaruh terhadap tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.

2.7.4. Pengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Efisiensi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah merupakan kemampuan daerah untuk membiayai daerahnya sendiri dan tidak bergantung dengan pembiayaan yang berasal dari pemerintah pusat. Jika dikaitkan dengan teori stewardship, tingkat kemandirian keuangan pemerintah merupakan hal yang berkaitan dengan keberhasilan kebijakan *refocusing* anggaran dan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal itu disebabkan tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah memengaruhi tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian (Sarah, 2019) menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Adanya peningkatan kemandirian pemerintah daerah memperkuat terkait pengaruhnya dengan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah yang semakin meningkat. Berdasarkan asumsi tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H4 : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *multistage cluster random sampling*. *Multistage cluster random sampling* merupakan pengambilan sampel gugus bertahap dengan teknik pengambilan secara bertahap sehingga penarikan sampel secara acak dilakukan pada setiap kelompok (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data keuangan pemerintah daerah tahun 2019-2022 yang tersedia di situs *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia dan laporan Badan Statistik Keuangan (BPS). Populasi penelitian ini sebanyak 2056 pemerintah daerah dengan populasi setiap tahunnya sebanyak 514 pemerintah daerah di Indonesia. Pengambilan sampel kabupaten dan kota di Indonesia menggunakan rumus slovin. Berikut rumus slovin menurut Sugiyono (2013) :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

N = Ukuran Populasi

n = Ukuran Sampel

e = Derajat toleransi ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan (5%)

$$\text{Persentase Sampel Prov} = \frac{\text{Total Kab dan Kota di Provinsi}}{\text{Total Sampel Kab dan Kota Seluruh Indonesia}} \times 100\%$$

Rumus perhitungan proporsi jumlah kabupaten dan kota di setiap provinsi

$$\text{Proporsi Kab} = \frac{\text{Total Kab di Provinsi}}{\text{Total Kab dan Kota di Provinsi}}$$

$$\text{Proporsi Kota} = \frac{\text{Total Kota di Provinsi}}{\text{Total Kab dan Kota di Provinsi}}$$

Rumus perhitungan sampel kabupaten dan kota di setiap provinsi :

$$\text{Sampel Kab} = \text{Proporsi Kab} \times \text{Total Sampel Prov}$$

$$\text{Sampel Kota} = \text{Proporsi Kota} \times \text{Total Sampel Prov}$$

Berdasarkan perhitungan sampel, diperoleh total sampel sebesar 896 pemerintah daerah pada tahun 2019-2020 dengan total sampel per tahunnya 224 pemerintah daerah.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Karakteristik entitas yang dapat diamati dan diukur untuk hasil penelitian adalah definisi operasional suatu variabel (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
Refocusing Anggaran	Refocusing anggaran merupakan upaya penyesuaian target pendapatan dan belanja daerah untuk prioritas penanganan Covid-19.	<ol style="list-style-type: none"> Rasio Perubahan Pendapatan (Widya <i>et al.</i>, 2022) : $\frac{\text{Anggaran } (n) - \text{Realisasi } (n-1)}{\text{Realisasi Pendapatan } (n-1)} \times 100\%$ Rasio Perubahan Belanja $\frac{\text{Anggaran } (n) - \text{Realisasi } (n-1)}{\text{Realisasi Belanja } (n-1)} \times 100\%$ Rasio Perubahan Pembiayaan $\frac{\text{Anggaran } (n) - \text{Realisasi } (n-1)}{\text{Realisasi Pembiayaan } (n-1)} \times 100\%$ 	Rasio
Tingkat Kemandirian Daerah	Tingkat kemandirian menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk membiayai urusan pemerintahan sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat.	Rumus Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah (Yuni <i>et al.</i> , 2022): $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio

Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan	Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah	Rumus Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan (Abdul Halim, 2007) $\frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
--	---	---	-------

3.3 Analisis Data

Analisis data merupakan metode yang digunakan menentukan hasil penelitian. Analisis data pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu uji analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji kelayakan model, dan uji hipotesis.

3.3.1. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data secara normal atau tidak. Uji normalitas diukur dengan menggunakan uji *Kolmogorov-smirnov test* dengan taraf signifikan 5%. Jika *p-value* $\geq 0,05$, maka data berdistribusi normal. Namun, jika *p-value* $\leq 0,05$, maka data berdistribusi tidak normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji adanya korelasi antar variabel bebas. Uji multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika $VIF < 10$ dan *Tolerance* $> 0,1$, maka model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji *glejser*.

5. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan periode $t-1$ atau periode sebelumnya. Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin Watson* (DW).

3.3.2. Uji Kelayakan Model

1. Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen dengan variabel dependen secara bersamaan. Berdasarkan kriteria uji F, jika nilai F hitung $> F$ tabel, maka signifikan. Jika F hitung $< F$ tabel, maka tidak signifikan. Jika angka signifikan $< 0,05$, maka signifikan dan jika angka signifikan $> 0,05$, maka tidak signifikan.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinan bertujuan untuk mengukur kemampuan model untuk menunjukkan pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Koefisien determinasi (R^2) memiliki nilai 0-1. Jika semakin mendekati satu maka pengaruh semakin kuat, sedangkan semakin mendekati 0 maka pengaruh semakin lemah.

3.3.3. Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan model analisis regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + c$$

Dimana :

Y	= Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah
X ₁	= Proksi Refocusing Anggaran (Perubahan Pendapatan)
X ₂	= Proksi Refocusing Anggaran (Perubahan Belanja)
X ₃	= Proksi Refocusing Anggaran (Perubahan Pembiayaan)
X ₄	= Tingkat Kemandirian Daerah
c	= <i>Error Term</i>

2. Uji t

Berdasarkan dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis penelitian ditolak. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis penelitian diterima.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Seluruh Indonesia pada rentang tahun 2019-2022. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah *refocusing* anggaran dan tingkat kemandirian daerah. Variabel *refocusing* anggaran diukur dengan 3 proksi yaitu perubahan anggaran pendapatan, perubahan anggaran belanja, dan perubahan anggaran pembiayaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Data diperoleh dari *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *multistage cluster random sampling* atau pengambilan sampel gugus bertahap. Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan secara merata. Populasi objek penelitian di Indonesia pada tahun 2019-2022 sebesar 2056 kabupaten dan kota yang didapat dari 34 provinsi dengan total 514 kabupaten dan kota di setiap tahunnya. Berdasarkan perhitungan pengambilan sampel, diperoleh 896 sampel data pada tahun 2019-2022 dengan total sampel 224 per tahunnya. Berikut ini adalah persebaran sampel di setiap provinsi di Indonesia.

Tabel 4.1 Sebaran Sampel Pemerintah Daerah

Sebaran Sampel Pemerintah Daerah				
Provinsi	P.Kab	P.Kota	S.Kab	S.Kota
Aceh	18	5	8	2
Sumatera Utara	25	8	11	4
Sumatera Barat	12	7	5	3
Riau	10	2	4	1
Kepulauan Riau	5	2	2	1
Jambi	9	2	4	1

Sebaran Sampel Pemerintah Daerah

Provinsi	P. Kab	P. Kota	S. Kab	S.Kot
Bengkulu	9	1	3	1
Sumatera Selatan	13	4	5	2
Kepulauan Bangka	6	1	2	1
Lampung	13	2	6	1
Banten	4	4	2	2
DKI Jakarta	1	5	-	-
Jawa Barat	18	9	8	3
Jawa Tengah	29	6	13	3
Jawa Timur	29	9	13	4
Yogyakarta	4	1	2	1
Bali	8	1	3	1
Nusa Tenggara Barat	8	2	3	1
Nusa Tenggara Timur	21	1	9	1
Kalimantan Barat	12	2	6	1
Kalimantan Selatan	11	2	5	1
Kalimantan Tengah	13	1	4	1
Kalimantan Timur	7	3	3	1
Kalimantan Utara	4	1	1	1
Gorontalo	5	1	2	1
Sulawesi Selatan	21	3	10	1
Sulawesi Tenggara	15	2	6	1
Sulawesi Tengah	12	1	4	1
Sulawesi Utara	11	4	5	2
Sulawesi Barat	6	0	4	0
Maluku	9	2	4	1
Maluku Utara	8	2	3	1
Papua	28	1	12	1
Papua Barat	12	1	5	1

	416	98	177	48
	Total	514	Total	224
	Populasi per Tahun		Sampel per Tahun	

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2023

4.2 Hasil Uji Analisis Data

4.2.1. Uji Analisis Deskriptif

1. *Refocusing* Anggaran (X_1)

Tabel 4.2 Tabel Hasil Uji Analisis Deskriptif Proksi Pertama

N	896
Minimum	-40,00%
Maximum	47,00%
Mean	2,4074%
Std. Deviation	9,71564%

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2023

Analisis deskriptif penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat SPSS *Statistic* 25. Berdasarkan tabel analisis deskriptif di atas menunjukkan bahwa data sampel yang digunakan sebanyak 896 data pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia tahun 2019-2022. Variabel *refocusing* anggaran diproksikan dengan perubahan anggaran pendapatan dan perubahan anggaran belanja dengan rata-rata variabel perubahan anggaran pendapatan sebesar 2,4074%. Nilai maksimal variabel *refocusing* anggaran dengan proksi perubahan pendapatan sebesar 47,00% yang dimiliki oleh Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2021. Nilai minimal sebesar -40% yang dimiliki oleh Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020. Nilai standar deviasi sebesar 9,71564% lebih besar dari nilai rata-rata (*mean*) yang menunjukkan bahwa penyebaran data besar.

Tabel 4.3 Tabel Hasil Uji Analisis Deskriptif Proksi Kedua

N	896
Minimum	-36,00%
Maximum	76,00%
Mean	8,4174%
Std. Deviation	11,64589%

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan tabel analisis deskriptif di atas menunjukkan bahwa data sampel dengan rata-rata variabel perubahan anggaran belanja sebesar 8,4174%. Nilai maksimal sebesar 76,00% dan nilai minimal sebesar -36%. Nilai standar deviasi sebesar 11,64589% lebih besar dari nilai rata-rata (*mean*) yang menunjukkan bahwa penyebaran data besar.

Tabel 4.3 Tabel Hasil Uji Analisis Deskriptif Proksi Ketiga

N	896
Minimum	-73865,00%
Maximum	6600,00%
Mean	-118,4163%
Std. Deviation	2718,93203%

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan tabel analisis deskriptif di atas menunjukkan bahwa data sampel dengan rata-rata variabel perubahan anggaran pembiayaan sebesar -118,4163%. Nilai maksimal sebesar 6600,00% dan nilai minimal sebesar -73865,00%. Nilai standar deviasi sebesar 2718,93203% lebih besar dari nilai rata-rata (*mean*) yang menunjukkan bahwa penyebaran data besar.

3. Tingkat Kemandirian Daerah (X_2)Tabel 4.4 Tabel Hasil Uji Analisis Deskriptif X_2

N	896
Minimum	0,00%
Maximum	159,00%
Mean	17,4319%
Std. Deviation	18,49469%

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan tabel analisis deskriptif di atas menunjukkan bahwa data sampel yang digunakan sebanyak 896 data dengan rata-rata variabel tingkat kemandirian daerah (X_2) sebesar 17,4319%. Nilai maksimal variabel X_2 sebesar 159,00% yang dimiliki oleh Kota Surabaya pada tahun 2019. Nilai minimal variabel X_2 sebesar 0,00% yang dimiliki oleh Kabupaten Deiyai tahun 2019 dan 2020, Kabupaten Yalimo 2022, dan Kabupaten Sorong tahun 2022 di Provinsi Papua. Nilai standar deviasi variabel X_2 sebesar 18,49469% lebih besar dari nilai rata-rata (*mean*) yang menunjukkan bahwa penyebaran data besar.

4. Efisiensi Pengelolaan Keuangan (Y)

Tabel 4.5 Tabel Hasil Uji Analisis Deskriptif Y

N	896
Minimum	62,00%
Maximum	249,00%
Mean	100,3828%
Std. Deviation	9,69995%

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan tabel analisis deskriptif di atas menunjukkan bahwa data sampel yang digunakan sebanyak 896 data dengan rata-rata variabel efisiensi pengelolaan keuangan (Y) sebesar 100,3828%. Nilai maksimal variabel Y sebesar 249,00% yang dimiliki oleh Kabupaten Paser pada tahun 2022. Nilai minimal variabel Y

sebesar 62% yang dimiliki oleh Kabupaten Palu tahun 2019. Nilai standar deviasi variabel Y sebesar 9,69995% lebih besar dari nilai rata-rata (*mean*) yang menunjukkan bahwa penyebaran data besar.

4.2.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji analisis data yang dilakukan untuk memberikan kepastian koefisien regresi sebelum dilakukan uji analisis regresi linier berganda. Pada penelitian ini, telah diperoleh hasil uji asumsi klasik di bawah ini :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan mengetahui distribusi data secara normal atau tidak. Teknik uji yang digunakan adalah *Kolmogorov-Smirnov*. Di bawah ini merupakan hasil uji normalitas pada penelitian ini :

Tabel 4.6 Tabel Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		896
Normal	Mean	0,0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	0,06826620
Most Extreme	Absolute	0,100
Differences	Positive	0,100
	Negative	-0,086
Test Statistic		0,100
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,093 ^c

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan tabel uji normalitas, syarat uji normalitas adalah jika nilai signifikansi yang diperoleh $> 0,05$. Pada uji normalitas penelitian ini, diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,093 yang dimana lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, data penelitian ini memenuhi kriteria data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan VIF (*Variance Inflation Factor*). Apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* < 10 , maka variabel independen

bebas dari multikolinearitas. Berikut merupakan hasil analisis uji multikolinearitas :

Tabel 4.7 Tabel Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
Perubahan Anggaran Pendapatan Perubahan Anggaran Belanja	0,666	1,502	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Perubahan Anggaran Pembiayaan Kemandirian	0,647	1,547	Tidak Terjadi Multikolinearitas
	0,978	1,022	Tidak Terjadi Multikolinearitas
	0,951	1,052	Tidak Terjadi Multikolinearitas

a. Dependent Variable: Efisiensi

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas di atas, menunjukkan bahwa nilai dari variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan model regresi penelitian bebas dari adanya multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan dari residual pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *glejser*. Berikut hasil uji heteroskedastisitas yang dilakukan :

Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandarized Coefficient		Standarized Coefficient	t	Sig.
	B	Std.Error	Beta		
(Constant)	0,041	0,020		2,080	0,039
Perubahan Anggaran Pendapatan	0,002	0,006	0,040	0,398	0,691
Perubahan Anggaran Belanja	0,004	0,007	0,063	0,617	0,538
Perubahan Anggaran Pembiayaan	0,01	0,002	0,039	0,466	0,642
Tingkat Kemandirian	-0,006	0,005	-0,107	-1,264	0,208

Dependent Variable: Efisiensi

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi pada hasil uji heteroskedastisitas dengan uji *glejser* $> 0,05$. Syarat model regresi bebas dari heteroskedastisitas pada uji *glejser* adalah nilai signifikansi $> 0,05$. Oleh karena itu, model regresi yang digunakan pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk menguji korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan periode $t-1$ atau periode sebelumnya. Analisis uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan *Durbin Watson* (DW). Berikut hasil uji autokorelasi yang telah dilakukan pada penelitian ini :

Tabel 4.7 Tabel Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,360 ^a	0,130	0,106	0,06920%	1,994

a. Predictors: (Constant), Tingkat Kemandirian, Perubahan Pendapatan, Perubahan Belanja, Perubahan Pembiayaan

b. Dependent Variable: Efisiensi

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2023

Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan 2 hipotesis di bawah ini :

H₀ = Tidak ada autokorelasi

H_a = Ada autokorelasi

Kriteria pengambilan keputusan pada Uji *Durbin Watson* (DW) adalah jika $0 < DW < dL$, maka terdapat autokorelasi positif dan jika $DW > dU$, maka tidak terdapat autokorelasi positif. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai DW 1,994 yang mana lebih besar dari dU. Pada tabel *Durbin Watson*, dU sebesar 1,89822 yang mana lebih kecil dari DW. Oleh karena itu, $DW > dU$ sehingga model penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.

4.2.3. Uji Kelayakan Model

1. Uji F

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji kelayakan model yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Jika nilai F hitung $> F$ tabel, maka signifikan. Jika F hitung $< F$ tabel, maka tidak signifikan. Jika angka signifikan $< 0,05$, maka signifikan dan jika angka signifikan $> 0,05$, maka tidak signifikan. Pada penelitian ini, F tabel yang digunakan adalah sebesar 3,005816 yang diperoleh dari rumus $F \text{ tabel} = F.INV.RT(0,05;k;n-k)$ dengan k (variabel independen) dan n (jumlah data sampel yang diolah). Di bawah ini merupakan hasil uji F yang diperoleh :

Tabel 4.8 Tabel Hasil Uji F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6786,411	4	1357,282	15,587	0,000 ^b
	Residual	77410,186	892	87,078		
	Total	84196,597	894			

a. Dependent Variable: Efisiensi

b. Predictors: (Constant), Tingkat Kemandirian, Perubahan Pendapatan, Perubahan Belanja, Perubahan Pembiayaan

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 yang dimana kurang dari 0,05 dan F hitung sebesar 10,189 yang lebih dari F Tabel 2,614884. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi $< 0,05$ dan F Hitung $> F$ Tabel sehingga model regresi layak digunakan.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) dilakukan dengan tujuan untuk menguji kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi (R^2) memiliki nilai 0-1. Jika semakin mendekati satu maka pengaruh semakin kuat, sedangkan semakin mendekati 0 maka pengaruh semakin lemah. Di bawah ini merupakan hasil uji koefisien determinasi (R^2) :

Tabel 4.9 Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,360 ^a	0,130	0,106	0,06920%

a. Predictors: (Constant), Tingkat Kemandirian, Perubahan Pendapatan, Perubahan Belanja, Perubahan Pembiayaan
b. Dependent Variable: Efisiensi

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,106. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh semakin lemah karena semakin mendekati 0. Oleh karena itu, sebesar 0,106 variabel-variabel independen memengaruhi variabel dependen dalam penelitian ini dan sisanya dipengaruhi oleh variable lain di luar model.

4.2.4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui korelasi antara masing-masing variabel. Uji hipotesis menunjukkan adanya korelasi baik positif maupun negatif. Dalam penelitian ini, digunakan analisis regresi linier berganda dengan hasil sebagai berikut :

1. Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4.10 Tabel Hasil Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	100,140	0,180		556,331	0,000
	Perubahan Pendapatan	-0,314	0,017	-0,673	-19,036	0,000
	Perubahan Belanja	0,265	0,014	0,679	18,951	0,000
	Perubahan Pembiayaan	0,009	0,007	0,106	1,331	0,185
	Kemandirian	-0,070	0,006	-0,299	-10,980	0,000

Dependent Variable: Efisiensi

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi dalam penelitian ini seperti di bawah ini :

$$Y = 100,140 - 0,314PP + 0,265PB + 0,009PBY - 0,070 KD + c$$

Keterangan :

Y = Efisiensi pengelolaan keuangan

PP = Perubahan Anggaran Pendapatan (Proksi X₁)PB = Perubahan Anggaran Belanja (Proksi X₁)PBY = Perubahan Anggaran Pembiayaan (Proksi X₃)KD = Kemandirian Keuangan Daerah (X₂)

Dari persamaan regresi linier berganda di atas, menunjukkan bahwa :

- Nilai konstanta dari persamaan memiliki nilai positif sebesar 100,140 yang berarti apabila *refocusing* anggaran (X₁) yang diproksikan dengan perubahan anggaran pendapatan dan perubahan anggaran belanja, serta tingkat kemandirian (X₂) bernilai 0, maka tingkat efisiensi keuangan (Y) mengalami kenaikan sebesar 100,140.
- Nilai koefisien perubahan anggaran pendapatan sebesar -0,314 yang menunjukkan bahwa apabila perubahan anggaran pendapatan mengalami

kenaikan 1% sedangkan nilai koefisien lain tetap, maka tingkat efisiensi keuangan (Y) mengalami penurunan sebesar 0,314

- c. Nilai koefisien perubahan anggaran belanja sebesar -0,265 yang menunjukkan bahwa apabila perubahan anggaran belanja mengalami kenaikan 1% sedangkan nilai koefisien lain tetap, maka tingkat efisiensi keuangan (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,265.
- d. Nilai koefisien perubahan anggaran pembiayaan sebesar 0,009 yang menunjukkan bahwa apabila perubahan anggaran pembiayaan mengalami kenaikan 1% sedangkan nilai koefisien lain tetap, maka tingkat efisiensi keuangan (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,009.
- e. Nilai koefisien tingkat kemandirian (X_2) sebesar -0,070 yang menunjukkan bahwa apabila tingkat kemandirian mengalami kenaikan 1% sedangkan koefisien lain tetap, maka tingkat efisiensi keuangan (Y) mengalami penurunan sebesar 0,070.

2. Uji t

Uji t dilakukan dengan tujuan untuk mengukur pengaruh satu variabel bebas secara individu dalam menjelaskan terkait variasi variabel dependennya. Jika nilai t Hitung $< t$ Tabel dan nilai signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis penelitian ditolak. Jika nilai t Hitung $> t$ Tabel dan nilai signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis penelitian diterima. Pada penelitian ini, nilai t Tabel yang digunakan sebesar 1,962627 dan t Tabel negatif sebesar -1,962627 dengan tingkat signifikansi 5%. Di bawah ini merupakan hasil uji t pada penelitian ini :

Tabel 4.11 Tabel Hasil Uji t

Variabel	Pengukuran	t Hitung	sig.	Ket
Refocusing Anggaran	Perubahan Pendapatan	-19,036	0,000	Diterima
	Perubahan Belanja	18,951	0,000	Diterima
	Perubahan Pembiayaan	1,331	0,185	Ditolak
Tingkat Kemandirian	Rasio Kemandirian	-10,980	0,000	Diterima

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh penjelasan terkait pengaruh variabel independen dan dependen yaitu sebagai berikut :

1. Variabel *refocusing* anggaran (X_1) yang diproksikan dengan perubahan anggaran pendapatan diperoleh t Hitung sebesar -19,036 yang dimana jika berdasarkan syarat t Hitung negatif lebih besar dari t tabel sebesar -1,962627 dan nilai signifikansinya $0,000 < 0.05$ yang berarti terdapat pengaruh terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
2. Variabel *refocusing* anggaran (X_1) yang diproksikan dengan perubahan anggaran belanja diperoleh t Hitung sebesar 18,951 yang dimana jika berdasarkan syarat, t Hitung lebih besar dari t Tabel sebesar 1,962627 dan nilai signifikansinya $0,000 < 0.05$ yang berarti terdapat pengaruh terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
3. Variabel *refocusing* anggaran (X_1) yang diproksikan dengan perubahan anggaran pembiayaan diperoleh t Hitung sebesar 1,331 yang dimana jika berdasarkan syarat, t Hitung lebih kecil dari t Tabel sebesar 1,962627 dan nilai signifikansinya $0,185 > 0.05$ yang berarti tidak terdapat pengaruh terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
4. Variabel tingkat kemandirian (X_2) diperoleh t hitung sebesar -10,98 yang dimana lebih besar dari t Tabel sebesar 1,962627 dan nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh terhadap variabel tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1. Pengaruh *Refocusing* Anggaran

Berdasarkan perhitungan hipotesis terkait dengan variabel *refocusing* anggaran (X_1) yang diproksikan dengan perubahan anggaran pendapatan, perubahan anggaran belanja, dan perubahan anggaran pembiayaan, terdapat dua hasil yang berbeda. Variabel *refocusing* anggaran yang diproksikan dengan perubahan anggaran pendapatan menunjukkan hasil perolehan t Hitung sebesar -19,036 > t Tabel atau berada dalam daerah berpengaruh dan signifikansi $0,000 <$

0,005 yang memiliki arti *refocusing* anggaran yang diproksikan dengan perubahan anggaran berpengaruh terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Variabel *refocusing* anggaran yang diproksikan dengan perubahan anggaran belanja menunjukkan hasil t Hitung sebesar $18,951 > t$ Tabel sebesar $1,9262627$ dan berada dalam daerah berpengaruh dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,005$ yang berarti berpengaruh terhadap efisiensi pengelolaan keuangan. Sedangkan, variabel *refocusing* anggaran yang diproksikan dengan perubahan pembiayaan menunjukkan hasil t Hitung sebesar $1,331 < t$ Tabel dan nilai signifikansi $0,185 > t$ Tabel sehingga berada di daerah tidak berpengaruh. Hasil hipotesis tersebut, menunjukkan *refocusing* anggaran berpengaruh terhadap efisiensi pengelolaan keuangan jika diproksikan dengan perubahan anggaran pendapatan dan belanja, sedangkan tidak berpengaruh jika diproksikan dengan perubahan anggaran pembiayaan

Berdasarkan perhitungan *refocusing* anggaran yang diproksikan dengan perubahan anggaran pendapatan dan perubahan anggaran belanja menunjukkan nilai yang fluktuatif. *Refocusing* anggaran dengan proksi perubahan anggaran pendapatan menunjukkan rata-rata perubahan pada tahun 2019 sebesar 6%, tahun 2020 sebesar 1%, tahun 2021 sebesar 2%, dan tahun 2022 sebesar 0,21%. Nilai yang fluktuatif tersebut salah satunya diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kondisi keuangan tidak stabil. Perubahan anggaran dilakukan dengan menyesuaikan kondisi keuangan tahun sebelumnya untuk memperbaiki kinerja keuangan pemerintah. Pengukuran perubahan anggaran pendapatan diperoleh dari selisih realisasi pendapatan tahun sebelumnya dengan anggaran pendapatan tahun berjalan. Hal itu dilakukan pemerintah untuk memperbaiki realisasi pendapatan daerah dengan memperhatikan kondisi daerah tersebut. Rata-rata perubahan anggaran pendapatan mengalami penurunan pada tahun 2020, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2021, dan kembali menurun lagi pada tahun 2022.

Perhitungan *refocusing* anggaran yang diproksikan dengan perubahan belanja menunjukkan rata-rata perubahan pada 2019 sebesar 11%, 2020 sebesar

36%, 2021 sebesar 7%, dan 2022 sebesar 8%. Perubahan anggaran belanja selama tahun 2019-2022 fluktuatif dengan nilai paling besar pada tahun 2020 sebesar 36%. Hal tersebut terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang memaksa pemerintah untuk mengalokasikan anggaran untuk belanja penanganan pandemi Covid-19. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Indonesia rata-rata telah melakukan *refocusing* anggaran meskipun persentase perubahannya kecil pada pendapatan dan belanja daerah.

Refocusing anggaran berdasarkan analisis tersebut menunjukkan hasil berpengaruh terhadap efisiensi pengelolaan keuangan sesuai dengan proksi perubahan anggaran pendapatan dan perubahan anggaran belanja. Sedangkan, *refocusing* anggaran yang diproksikan dengan perubahan pembiayaan tidak berpengaruh terhadap tingkat efisiensi pengelolaan keuangan. Hal tersebut menunjukkan arti bahwa ketika pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pembiayaan yang didapat dari pemerintah pusat tidak berpengaruh dengan efisiensi pengelolaan keuangan daerah tersebut. Efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2019-2020 menunjukkan nilai rata-rata kurang efisien dengan persentase mendekati 100%. Pengukuran efisiensi pengelolaan keuangan tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah. Apabila selisih realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah besar, maka rasio efisiensi pengelolaan keuangan semakin kecil sehingga semakin efisien.

Berdasarkan hasil analisis data, *refocusing* anggaran dengan proksi perubahan anggaran pendapatan berpengaruh secara negatif terhadap efisiensi pengelolaan keuangan dan proksi perubahan anggaran belanja berpengaruh secara positif terhadap efisiensi pengelolaan keuangan. menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Indonesia rata-rata telah melakukan *refocusing* anggaran meskipun persentase perubahannya kecil pada pendapatan daerah. Sesuai dengan teori yang digunakan terkait interaksi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta masyarakat telah diterapkan. Pemerintah pusat memberikan wewenang pada pemerintah daerah untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanjanya yang

berpengaruh pada efisiensi pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel *refocusing* anggaran (X_1) dengan proksi perubahan anggaran pendapatan dan perubahan anggaran belanja berpengaruh terhadap efisiensi pengelolaan keuangan (Y), sedangkan *refocusing* anggaran dengan proksi perubahan pembiayaan tidak berpengaruh terhadap efisiensi pengelolaan keuangan (Y).

4.3.2. Pengaruh Tingkat Kemandirian Daerah

Berdasarkan perhitungan hipotesis kedua terkait dengan tingkat kemandirian daerah (X_2) diperoleh t Hitung sebesar -10,980 dengan t Tabel sebesar -1.962627 yang menunjukkan t Hitung berada pada daerah berpengaruh. Hal tersebut menunjukkan bahwa t Hitung $>$ t Tabel dan nilai signifikansi $0,000 < 0.005$ yang berarti hipotesis kedua diterima. Hipotesis kedua untuk variabel tingkat kemandirian daerah menunjukkan adanya pengaruh pada efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Tingkat kemandirian daerah menunjukkan pengaruh secara negatif yang berarti ketika nilai tingkat kemandirian daerah mengalami kenaikan, maka nilai efisiensi keuangan daerah mengalami penurunan.

Tingkat kemandirian pemerintah daerah berdasarkan analisis data pada tahun 2019-2022 cenderung fluktuatif di setiap tahunnya. Tingkat kemandirian keuangan daerah pada tahun 2019 sebesar 19,1%, tahun 2020 sebesar 18,8%, tahun 2021 sebesar 15%, dan tahun 2020 sebesar 23%. Tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah di Indonesia pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan adanya penurunan disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat. Tingkat kemandirian daerah terendah ada pada tahun 2021 sebesar 15%. Rendahnya tingkat kemandirian tersebut diakibatkan oleh PAD yang lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan daerah lainnya. Hal itu sejalan dengan pengukuran tingkat kemandirian daerah dengan membandingkan PAD dengan penerimaan daerah lain yang diantaranya transfer dari pemerintah pusat dan pinjaman dari pemerintah lainnya. Sesuai dengan teori yang digunakan, terdapat interaksi antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat terkait dengan keberhasilan tingkat kemandirian daerah.

Hasil perhitungan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan keuangan pada tahun 2019-2022 cenderung kurang efisien. Efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 99% (kurang efisien), tahun 2020 sebesar 100% (tidak efisien), tahun 2021 sebesar 101% (tidak efisien), dan tahun 2022 sebesar 98% (kurang efisien). Hasil tersebut menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan masih kurang efisien meskipun pasca pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil analisis data, tingkat kemandirian pemerintah daerah yang menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat memengaruhi tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah tersebut.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan di bawah ini :

1. *Refocusing* anggaran dengan proksi perubahan anggaran pendapatan dan perubahan anggaran belanja berpengaruh terhadap tingkat efisiensi pengelolaan keuangan. Sedangkan, *refocusing* anggaran dengan proksi perubahan pembiayaan tidak berpengaruh terhadap efisiensi pengelolaan keuangan. Berdasarkan hal tersebut, maka apabila *refocusing* anggaran dengan proksi perubahan anggaran pendapatan dan belanja mengalami kenaikan maupun penurunan akan memengaruhi efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.
2. Tingkat kemandirian daerah berpengaruh terhadap tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka apabila tingkat kemandirian daerah mengalami kenaikan maupun penurunan akan memengaruhi efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini di adalah menggunakan data sampel yang diperoleh dari *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia pada rentang tahun 2019-2020 sehingga memungkinkan terjadinya anomali data pada *website* sehingga beberapa data pemerintah daerah tidak dapat di akses.

5.3 Saran

Saran penulis untuk peneliti selanjutnya adalah perluas perolehan informasi data sampel pada *website-website* resmi pemerintah daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menghindari adanya anomali data pada data pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnika. (2021). *Analisis Kinerja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Sebelum dan Saat Pandemi* *Performance Analysis of Regional Income and Expenditure Budget in Subang Regency Regional Government Before and During The Covid-19 Pa. 1(3)*, 493–503.
- Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). *ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19* *Politeknik Keuangan Negara STAN*. 83–93.
- BKN. (2021). *NOMOR : 9 TAHUN 2021*.
- Dalamnegeri, M., & Menteri, D. A. N. (2020). *Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease*.
- Giovani Rizky Dhia, S. D. E. (2022). *Kebijakan Refocusing Anggaran dan Strategi*. 6, 4125–4133.
- Hamzah, A. P. (2014). *Hamzah, Andy P. indonesia-economic-prospects-iep-june-2022-financial-deepening-for-stronger-growth-and-sustainable-recovery @ www.worldbank.org. (n.d.)*. <https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/publication/indonesia-economic-prospects-iep-june-2022-financial-deepening-for-stronger-growth-and-sustainable-recovery>
- Indriani, I. (2021). *ANALISIS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DI INDONESIA*.
- Innovation, B. (n.d.). *Sopannah & Haikal*. 35, 1–9.
- Kadek, N., & Indrawati, N. (2019). *DI WILAYAH SARBAGITA PROVINSI BALI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali*. 8(5), 2834–2861.
- Karina, N. N., & Wibowo, P. (2022). *ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19*. 14(2), 146–167. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v14i2.4512>
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020*. (2020). 2019(022805), 22805–22813.
- Keuangan, S. (2022). *Badan Statistik keuangan 2021*.
- Mendagri. (2020). *No Title*. 2019.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011*. (2011).
- Puspita, Wulan Dri, and D. A. P. (2022). *ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMKOT BATU SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19* *Wulan Dri Puspita 1* , Dyah Ani Pangastuti 2*. 15(1), 90–104.
- Rheswari, P. A., & Akbar, F. S. (2022). *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Al-*

- Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. 4(6), 1897–1913.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1442>
- Sarah, D. (2019). *TERHADAP EFISIENSI BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA DI SUMATERA UTARA*. 10(1), 1–14.
- Sorida. (2022). *ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN*. 1(2), 78–82.
- Statistik, B. P. (2021). *Statistik keuangan 2020*.
- Syahara, B. Q., & Aufa, M. (2022). *PROVINSI JAWA TIMUR SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19*. 38(1), 27–38.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya*. (2014).
- Widya, B., Dirgantari, N., Hariyanto, E., & Winarni, D. (2022). *ANGGARAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH (DI PROVINSI JAWA)*. 5, 401–409. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v5i2.695>
- Yuni, Sitepu, B., & Simatupang, N. L. (2022). *DAERAH SUMATERA UTARA PADA MASA PANDEMI COVID-19*. 3(1), 1–8.
- Yuniza, M. E., Inggawati, M. P., Nengah, N., Riska, D., & Nandita, P. (2022). *Government Policy on Refocusing Activity and Re-allocation Budget of Local Government in Pandemic and New Normal Period*. 659(39), 75–83.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabulasi Data

Tahun	Nama Daerah	X ₁			X ₂	Y
		Proksi 1	Proksi 2	Proksi 3		
2019	Kab Gayo Lues	14.00%	20.00%	100.00%	6.00%	104.00%
2019	Kab Pidie	14.00%	14.00%	0.00%	13.00%	102.00%
2019	Kab Aceh Jaya	16.00%	22.00%	-24.00%	8.00%	98.00%
2019	Kab Pidie Jaya	16.00%	-18.00%	-100.00%	7.00%	98.00%
2019	Kab Aceh Barat	14.00%	19.00%	0.00%	12.00%	98.00%
2019	Kab Aceh Besar	2.00%	3.00%	-55.00%	10.00%	100.00%
2019	Kab Bener Meriah	8.00%	8.00%	0.00%	9.00%	100.00%
2019	Kab Aceh Utara	16.00%	18.00%	0.00%	12.00%	101.00%
2019	Kota Banda Aceh	14.00%	12.00%	-67.00%	24.00%	101.00%
2019	Kota Sabang	9.00%	21.00%	0.00%	10.00%	102.00%
2019	Kab Tapanuli Tengah	2.00%	8.00%	-75.00%	8.00%	102.00%
2019	Kab Toba Samosir	8.00%	7.00%	-52.00%	7.00%	99.00%
2019	Kab Batu Bara	8.00%	23.00%	0.00%	12.00%	100.00%
2019	Kab Samosir	11.00%	11.00%	-96.00%	7.00%	97.00%
2019	Kab Nias Barat	3.00%	5.00%	24.00%	3.00%	95.00%
2019	Kab Nias Utara	12.00%	13.00%	-100.00%	7.00%	95.00%
2019	Kab.Labuhanbatu Sel	7.00%	14.00%	100.00%	8.00%	98.00%
2019	Kab. Dairi	7.00%	7.00%	-68.00%	7.00%	97.00%
2019	Kab.Deli Serdang	19.00%	17.00%	-84.00%	30.00%	101.00%
2019	Kab Nias	-10.00%	-10.00%	-78.00%	13.00%	101.00%
2019	Kab Simalungun	11.00%	7.00%	-87.00%	9.00%	98.00%
2019	Kota Binjai	-3.00%	-7.00%	-107.00%	14.00%	99.00%
2019	Kota Medan	44.00%	46.00%	-45.00%	50.00%	92.00%
2019	Kota Tebing Tinggi	3.00%	0.00%	-90.00%	17.00%	97.00%
2019	Kota Sibolga	8.00%	5.00%	-88.00%	13.00%	95.00%
2019	Kab Dharmasraya	13.00%	9.00%	100.00%	8.00%	102.00%
2019	Kab Pasaman Barat	9.00%	15.00%	17.00%	9.00%	99.00%
2019	Kab Solok	8.00%	10.00%	-30.00%	6.00%	99.00%
2019	Kab Pesisir Selatan	14.00%	16.00%	-2.00%	9.00%	100.00%

2019	Kab Agam	9.00%	12.00%	-100.00%	9.00%	100.00%
2019	Kota Padang	24.00%	25.00%	-62.00%	30.00%	100.00%
2019	Kota Solok	11.00%	6.00%	-61.00%	7.00%	99.00%
2019	Kota Pariaman	9.00%	14.00%	-39.00%	6.00%	104.00%
2019	Kab Kampar	9.00%	19.00%	0.00%	11.00%	99.00%
2019	Kab Pelalawan	5.00%	24.00%	0.00%	10.00%	89.00%
2019	Kab Indragiri Hilir	14.00%	25.00%	-73865.00%	8.00%	99.00%
2019	Kab Siak	2.00%	11.00%	100.00%	13.00%	94.00%
2019	Kota Pekanbaru	15.00%	16.00%	-100.00%	43.00%	100.00%
2019	Kab Karimun	6.00%	15.00%	-100.00%	39.00%	100.00%
2019	Kab Natuna	17.00%	40.00%	1663.00%	4.00%	93.00%
2019	Kota Tanjung Pinang	5.00%	17.00%	100.00%	18.00%	105.00%
2019	Kab Batanghari	16.00%	19.00%	-104.00%	7.00%	102.00%
2019	Kab Muaro Jambi	5.00%	11.00%	100.00%	7.00%	102.00%
2019	Kab Kerinci	10.00%	20.00%	-6.00%	7.00%	102.00%
2019	Kab Tebo	3.00%	8.00%	-100.00%	8.00%	97.00%
2019	Kota Jambi	2.00%	8.00%	-100.00%	30.00%	98.00%
2019	Kab Bengkulu Utara	10.00%	11.00%	-79.00%	6.00%	102.00%
2019	Kab Mukomuko	16.00%	19.00%	3.00%	9.00%	101.00%
2019	Kab Bengkulu Selatan	12.00%	18.00%	133.00%	9.00%	101.00%
2019	Kota Bengkulu	11.00%	40.00%	-10293.00%	19.00%	97.00%
2019	Kab Lahat	0.00%	7.00%	100.00%	7.00%	89.00%
2019	Kab Musi Banyuasin	-11.00%	-8.00%	-77.00%	8.00%	93.00%
2019	Kab Muara Enim	12.00%	16.00%	-103.00%	11.00%	97.00%
2019	Kab Ogan Hilir	11.00%	14.00%	-100.00%	6.00%	97.00%
2019	Kab Banyuasin	9.00%	33.00%	440.00%	9.00%	99.00%
2019	Kota Lubuk Linggau	19.00%	19.00%	-228.00%	11.00%	92.00%
2019	Kota Palembang	33.00%	26.00%	-448.00%	37.00%	100.00%
2019	Kab Bangka	6.00%	13.00%	-100.00%	13.00%	99.00%
2019	Kab Belitung	6.00%	19.00%	-100.00%	20.00%	101.00%
2019	Kota Pangkal Pinang	-8.00%	-2.00%	-84.00%	20.00%	104.00%
2019	Kab Pesisir Barat	8.00%	7.00%	100.00%	4.00%	98.00%
2019	Kab Mesuji	6.00%	22.00%	100.00%	5.00%	101.00%
2019	Kab Lampung Barat	1.00%	5.00%	38.00%	6.00%	100.00%

2019	Kab Lampung Selatan	6.00%	20.00%	76.00%	14.00%	94.00%
2019	Kab Lampung Utara	11.00%	15.00%	-179.00%	6.00%	94.00%
2019	Kab Lampung Timur	7.00%	12.00%	-835.00%	6.00%	94.00%
2019	Kota Bandar Lampung	23.00%	15.00%	-443.00%	38.00%	95.00%
2019	Kab Tangerang	-3.00%	0.00%	-53.00%	93.00%	102.00%
2019	Kab Serang	2.00%	7.00%	-41.00%	30.00%	106.00%
2019	Kota Cilegon	13.00%	26.00%	7.00%	56.00%	103.00%
2019	Kota Tangerang	6.00%	14.00%	-23.00%	90.00%	102.00%
2019	Kab Tasikmalaya	-10.00%	-5.00%	7.00%	8.00%	100.00%
2019	Kab Subang	-11.00%	-10.00%	-96.00%	18.00%	105.00%
2019	Kab Purwakarta	6.00%	17.00%	279.00%	24.00%	98.00%
2019	Kab Sumedang	-1.00%	0.00%	-198.00%	18.00%	100.00%
2019	Kab Sukabumi	5.00%	4.00%	-82.00%	18.00%	96.00%
2019	Kab Kuningan	1.00%	-1.00%	-100.00%	12.00%	101.00%
2019	Kab Bandung	-16.00%	0.00%	22.00%	22.00%	91.00%
2019	Kab Ciamis	-5.00%	-6.00%	-101.00%	10.00%	93.00%
2019	Kota Bekasi	37.00%	32.00%	-100.00%	69.00%	100.00%
2019	Kota Depok	-5.00%	21.00%	-6.00%	67.00%	103.00%
2019	Kota Cirebon	4.00%	9.00%	7.00%	39.00%	105.00%
2019	Kab Kendal	9.00%	14.00%	-51.00%	19.00%	97.00%
2019	Kab Jepara	3.00%	1.00%	-87.00%	19.00%	104.00%
2019	Kab Karanganyar	0.00%	12.00%	10.00%	22.00%	99.00%
2019	Kab Kudus	-14.00%	-7.00%	-100.00%	20.00%	100.00%
2019	Kab Klaten	23.00%	29.00%	-39.00%	13.00%	99.00%
2019	Kab Purbalingga	6.00%	9.00%	-57.00%	17.00%	101.00%
2019	Kab Purworejo	6.00%	4.00%	0.00%	15.00%	100.00%
2019	Kab Semarang	5.00%	5.00%	-72.00%	23.00%	102.00%
2019	Kab Rembang	0.00%	1.00%	-59.00%	20.00%	101.00%
2019	Kab Wonogiri	1.00%	8.00%	-50.00%	13.00%	103.00%
2019	Kab Wonosobo	2.00%	9.00%	-46.00%	14.00%	99.00%
2019	Kab Tegal	11.00%	11.00%	-34.00%	19.00%	99.00%
2019	Kab Sukoharjo	-4.00%	-4.00%	-10.00%	27.00%	103.00%
2019	Kota Magelang	0.00%	10.00%	-100.00%	39.00%	103.00%
2019	Kota Surakarta	3.00%	5.00%	-67.00%	39.00%	102.00%
2019	Kota Salatiga	3.00%	3.00%	0.00%	34.00%	100.00%
2019	Kab Malang	5.00%	15.00%	-28.00%	18.00%	100.00%
2019	Kab Mojokerto	3.00%	8.00%	-80.00%	28.00%	100.00%

2019	Kab Madiun	6.00%	11.00%	-87.00%	13.00%	100.00%
2019	Kab Lamongan	5.00%	5.00%	-73.00%	20.00%	101.00%
2019	Kab Nganjuk	-20.00%	-14.00%	265.00%	17.00%	100.00%
2019	Kab Ngawi	3.00%	8.00%	-74.00%	13.00%	104.00%
2019	Kab Ponorogo	0.00%	6.00%	-31.00%	14.00%	112.00%
2019	Kab Pacitan	-3.00%	17.00%	164.00%	13.00%	98.00%
2019	Kab Sidoarjo	-2.00%	15.00%	-32.00%	61.00%	99.00%
2019	Kab Jombang	5.00%	19.00%	-56.00%	22.00%	100.00%
2019	Kab Kediri	3.00%	18.00%	0.00%	18.00%	96.00%
2019	Kab Tuban	-3.00%	3.00%	-66.00%	24.00%	102.00%
2019	Kab Jember	2.00%	7.00%	-100.00%	21.00%	96.00%
2019	Kota Pasuruan	-1.00%	27.00%	11.00%	22.00%	96.00%
2019	Kota Batu	0.00%	17.00%	-88.00%	23.00%	105.00%
2019	Kota Surabaya	7.00%	16.00%	0.00%	159.00%	98.00%
2019	Kota Kediri	-11.00%	4.00%	0.00%	25.00%	101.00%
2019	Kab Bantul	-3.00%	10.00%	4.00%	29.00%	98.00%
2019	Kab Sleman	-1.00%	9.00%	-56.00%	52.00%	98.00%
2019	Kota Yogyakarta	-1.00%	12.00%	-8.00%	64.00%	101.00%
2019	Kab Jembrana	5.00%	-2.00%	-81.00%	13.00%	101.00%
2019	Kab Karangasem	14.00%	19.00%	-40.00%	17.00%	97.00%
2019	Kab Gianyar	15.00%	30.00%	272.00%	76.00%	103.00%
2019	Kota Denpasar	0.00%	13.00%	-15.00%	85.00%	99.00%
2019	Kab Dompu	12.00%	14.00%	-41.00%	10.00%	103.00%
2019	Kab Sumbawa	11.00%	11.00%	0.00%	10.00%	99.00%
2019	Kota Mataram	0.00%	1.00%	-75.00%	34.00%	103.00%
2019	Kota Bima	0.00%	6.00%	0.00%	7.00%	100.00%
2019	Kab Manggarai Barat	12.00%	17.00%	0.00%	17.00%	98.00%
2019	Kab Sumba Tengah	11.00%	14.00%	-67.00%	5.00%	95.00%
2019	Kab Malaka	13.00%	18.00%	-16.00%	6.00%	101.00%
2019	Kab Alor	1.00%	5.00%	-100.00%	5.00%	102.00%
2019	Kab Belu	5.00%	7.00%	0.00%	10.00%	96.00%
2019	Kab Kupang	4.00%	13.00%	0.00%	5.00%	97.00%
2019	Kab Manggarai	11.00%	11.00%	-116.00%	9.00%	98.00%
2019	Kab Sikka	11.00%	14.00%	0.00%	9.00%	101.00%
2019	Kota Kupang	3.00%	4.00%	-100.00%	19.00%	90.00%
2019	Kab Bengkayang	14.00%	14.00%	-250.00%	5.00%	100.00%
2019	Kab Landak	2.00%	4.00%	-77.00%	7.00%	101.00%
2019	Kab Melawi	11.00%	21.00%	121.00%	4.00%	103.00%
2019	Kab Kubu Raya	-6.00%	-1.00%	-49.00%	13.00%	100.00%

2019	Kab Sambas	2.00%	2.00%	-100.00%	9.00%	99.00%
2019	Kab Ketapang	3.00%	6.00%	-100.00%	9.00%	92.00%
2019	Kota Pontianak	6.00%	8.00%	-288.00%	37.00%	101.00%
2019	Kab Banjar	12.00%	21.00%	0.00%	13.00%	102.00%
2019	Kab Barito Kuala	0.00%	4.00%	-98.00%	7.00%	93.00%
2019	Kab Tanah Bumbu	8.00%	26.00%	-5.00%	8.00%	99.00%
2019	Kab Kota Baru	35.00%	36.00%	10.00%	9.00%	99.00%
2019	Kab Tabalong	-2.00%	-1.00%	-88.00%	13.00%	106.00%
2019	Kota Banjarmasin	11.00%	37.00%	-12.00%	25.00%	97.00%
2019	Kab Kapuas	16.00%	16.00%	-13.00%	9.00%	94.00%
2019	Kab Katingan	-2.00%	6.00%	6.00%	5.00%	99.00%
2019	Kab Barito Utara	12.00%	9.00%	-100.00%	6.00%	95.00%
2019	Kab Gunung mas	6.00%	2.00%	-181.00%	8.00%	96.00%
2019	Kota Palangkaraya	0.00%	9.00%	603.00%	18.00%	86.00%
2019	Kab Kutai Barat	15.00%	21.00%	-51.00%	7.00%	95.00%
2019	Kab Paser	10.00%	26.00%	-15.00%	7.00%	100.00%
2019	Kab Berau	14.00%	25.00%	-100.00%	8.00%	98.00%
2019	Kota Balikpapan	10.00%	15.00%	-100.00%	45.00%	99.00%
2019	Kab Nunukan	9.00%	10.00%	25.00%	9.00%	83.00%
2019	Kota Tarakan	24.00%	25.00%	-77.00%	9.00%	103.00%
2019	Kab Gorontalo	3.00%	6.00%	-54.00%	12.00%	102.00%
2019	Kab Bone Bolango	4.00%	9.00%	19.00%	8.00%	98.00%
2019	Kota Gorontalo	9.00%	13.00%	-56.00%	28.00%	99.00%
2019	Kab Sinjay	-1.00%	19.00%	411.00%	10.00%	101.00%
2019	Kab Kepulauan Selayar	-4.00%	5.00%	-20.00%	8.00%	98.00%
2019	Kab Soppeng	1.00%	1.00%	-95.00%	13.00%	101.00%
2019	Kab Takalar	2.00%	6.00%	100.00%	10.00%	99.00%
2019	Kab Wajo	11.00%	10.00%	-74.00%	10.00%	96.00%
2019	Kab Pare-Pare	13.00%	19.00%	-305.00%	17.00%	98.00%
2019	Kab Toraja Utara	5.00%	9.00%	-85.00%	6.00%	97.00%
2019	Kab Bone	5.00%	6.00%	-82.00%	10.00%	98.00%
2019	Kab Bulukumba	5.00%	6.00%	59.00%	13.00%	100.00%
2019	Kab Gowa	2.00%	3.00%	-62.00%	15.00%	97.00%
2019	Kota Palopo	5.00%	3.00%	-89.00%	20.00%	102.00%
2019	Kab Buton Tengah	-1.00%	3.00%	-65.00%	3.00%	98.00%

2019	Kab Kolaka Timur	11.00%	15.00%	-89.00%	4.00%	98.00%
2019	Kab Buton Selatan	1.00%	10.00%	-17.00%	2.00%	98.00%
2019	Kab Buton	-5.00%	-5.00%	1257.00%	4.00%	97.00%
2019	Kab Muna	-33.00%	-31.00%	-68.00%	4.00%	108.00%
2019	Kab Konawe Selatan	8.00%	10.00%	13.00%	5.00%	99.00%
2019	Kota Kendari	33.00%	48.00%	1915.00%	20.00%	100.00%
2019	Kab Banggai	9.00%	9.00%	-60.00%	10.00%	100.00%
2019	Kab Buol	3.00%	4.00%	-36.00%	7.00%	100.00%
2019	Kab Toli-Toli	16.00%	17.00%	-346.00%	9.00%	102.00%
2019	Kab Poso	5.00%	7.00%	-77.00%	8.00%	62.00%
2019	Kota Palu	-1.00%	18.00%	-100.00%	12.00%	99.00%
2019	Kab Minahasa	5.00%	9.00%	-19.00%	8.00%	98.00%
2019	Kab Sangihe	17.00%	34.00%	214.00%	7.00%	104.00%
2019	Kab Tomohon	3.00%	1.00%	-68.00%	7.00%	103.00%
2019	Kab Minahasa Selatan	0.00%	7.00%	18.00%	5.00%	98.00%
2019	Kab Kotamobagu	-3.00%	0.00%	0.00%	10.00%	106.00%
2019	Kota Manado	8.00%	18.00%	-16.00%	33.00%	102.00%
2019	Kota Bitung	-9.00%	-9.00%	-78.00%	11.00%	100.00%
2019	Kab Mamuju	5.00%	6.00%	11.00%	8.00%	99.00%
2019	Kab Mamasa	3.00%	4.00%	6600.00%	3.00%	100.00%
2019	Kab Majene	12.00%	10.00%	-94.00%	7.00%	98.00%
2019	Kab Polewali Mandar	10.00%	12.00%	0.00%	12.00%	96.00%
2019	Kab Maluku Tengah	13.00%	16.00%	0.00%	4.00%	98.00%
2019	Kab Buru	14.00%	7.00%	-122.00%	3.00%	100.00%
2019	Kab Buru Selatan	-4.00%	-2.00%	-32.00%	2.00%	104.00%
2019	Kab Kepulauan Aru	10.00%	10.00%	-63.00%	7.00%	101.00%
2019	Kota Ambon	11.00%	6.00%	1668.00%	16.00%	101.00%
2019	Kab Halmahera Tengah	23.00%	43.00%	0.00%	6.00%	99.00%
2019	Kab Tidore Kepulauan	5.00%	6.00%	-74.00%	8.00%	96.00%
2019	Kab Halmahera Barat	6.00%	10.00%	293.00%	4.00%	99.00%
2019	Kota Ternate	16.00%	20.00%	-342.00%	12.00%	101.00%
2019	Kab Mappi	7.00%	16.00%	-90.00%	2.00%	113.00%
2019	Kab Tolikara	1.00%	19.00%	-1.00%	1.00%	99.00%

2019	Kab Keerom	20.00%	7.00%	-103.00%	3.00%	103.00%
2019	Kab Yahukimo	2.00%	9.00%	-14.00%	2.00%	103.00%
2019	Kab Yalimo	9.00%	6.00%	0.00%	2.00%	118.00%
2019	Kab Nduga	-5.00%	0.00%	0.00%	1.00%	99.00%
2019	Kab Lanny Jaya	6.00%	10.00%	0.00%	2.00%	95.00%
2019	Kab Jayapura	7.00%	14.00%	-100.00%	4.00%	95.00%
2019	Kab Jayawijaya	2.00%	2.00%	0.00%	4.00%	103.00%
2019	Kab Deiyai	0.00%	3.00%	-100.00%	0.00%	97.00%
2019	Kab Intan Jaya	2.00%	3.00%	0.00%	1.00%	97.00%
2019	Kab Biak Numfor	13.00%	28.00%	-100.00%	9.00%	97.00%
2019	Kota Jayapura	7.00%	14.00%	-100.00%	22.00%	102.00%
2019	Kab Fak-Fak	-3.00%	-3.00%	28.00%	3.00%	99.00%
2019	Kab Manokwari	11.00%	17.00%	18.00%	9.00%	108.00%
2019	Kab Sorong	15.00%	29.00%	3.00%	4.00%	90.00%
2019	Kab Pegunungan Arfak	4.00%	6.00%	-100.00%	1.00%	101.00%
2019	Kab Raja Ampat	20.00%	20.00%	0.00%	2.00%	96.00%
2019	Kota Sorong	11.00%	-9.00%	-100.00%	19.00%	98.00%
2020	Kab Gayo Lues	2.00%	3.00%	100.00%	7.00%	100.00%
2020	Kab Pidie	6.00%	5.00%	0.00%	12.00%	100.00%
2020	Kab Aceh Jaya	4.00%	8.00%	-71.00%	10.00%	102.00%
2020	Kab Pidie Jaya	6.00%	9.00%	-100.00%	9.00%	107.00%
2020	Kab Aceh Barat	3.00%	7.00%	-6244.00%	13.00%	100.00%
2020	Kab Aceh Besar	12.00%	18.00%	1455.00%	11.00%	102.00%
2020	Kab Bener Meriah	1.00%	1.00%	0.00%	8.00%	100.00%
2020	Kab Aceh Utara	6.00%	6.00%	0.00%	10.00%	98.00%
2020	Kota Banda Aceh	16.00%	15.00%	-92.00%	22.00%	101.00%
2020	Kota Sabang	-40.00%	-36.00%	2876.00%	10.00%	96.00%
2020	Kab Tapanuli Tengah	25.00%	26.00%	1529.00%	8.00%	106.00%
2020	Kab Toba Samosir	6.00%	13.00%	33.00%	6.00%	99.00%
2020	Kab Batu Bara	5.00%	13.00%	-26.00%	16.00%	103.00%
2020	Kab Samosir	5.00%	10.00%	-44.00%	8.00%	101.00%
2020	Kab Nias Barat	-3.00%	2.00%	162.00%	3.00%	103.00%
2020	Kab Nias Utara	6.00%	14.00%	100.00%	8.00%	105.00%
2020	Kab.Labuhanbatu Sel	3.00%	10.00%	-7.00%	7.00%	97.00%
2020	Kab. Dairi	1.00%	8.00%	100.00%	9.00%	100.00%
2020	Kab.Deli Serdang	11.00%	10.00%	-76.00%	32.00%	98.00%

2020	Kab Nias	-14.00%	-12.00%	-66.00%	13.00%	101.00%
2020	Kab Simalungun	3.00%	1.00%	-265.00%	8.00%	98.00%
2020	Kota Binjai	7.00%	8.00%	146.00%	15.00%	100.00%
2020	Kota Medan	10.00%	22.00%	85.00%	15.00%	97.00%
2020	Kota Tebing Tinggi	-16.00%	-8.00%	-276.00%	16.00%	99.00%
2020	Kota Sibolga	18.00%	24.00%	-95.00%	15.00%	92.00%
2020	Kab Dharmasraya	1.00%	6.00%	240.00%	9.00%	100.00%
2020	Kab Pasaman Barat	6.00%	12.00%	12.00%	11.00%	102.00%
2020	Kab Solok	-2.00%	1.00%	-46.00%	7.00%	100.00%
2020	Kab Pesisir Selatan	5.00%	9.00%	100.00%	9.00%	99.00%
2020	Kab Agam	1.00%	3.00%	100.00%	9.00%	99.00%
2020	Kota Padang	14.00%	17.00%	5.00%	30.00%	99.00%
2020	Kota Solok	-1.00%	13.00%	41.00%	8.00%	93.00%
2020	Kota Pariaman	8.00%	11.00%	100.00%	0.00%	102.00%
2020	Kab Kampar	-1.00%	2.00%	-76.00%	12.00%	106.00%
2020	Kab Pelalawan	-17.00%	1.00%	100.00%	11.00%	112.00%
2020	Kab Indragiri Hilir	7.00%	20.00%	235.00%	10.00%	99.00%
2020	Kab Siak	2.00%	9.00%	11.00%	16.00%	108.00%
2020	Kota Pekanbaru	10.00%	11.00%	100.00%	36.00%	100.00%
2020	Kab Karimun	0.00%	9.00%	100.00%	32.00%	100.00%
2020	Kab Natuna	-10.00%	7.00%	108.00%	6.00%	115.00%
2020	Kota Tanjung Pinang	2.00%	2.00%	100.00%	17.00%	97.00%
2020	Kab Batanghari	11.00%	10.00%	-74.00%	10.00%	100.00%
2020	Kab Muaro Jambi	8.00%	11.00%	-50.00%	8.00%	105.00%
2020	Kab Kerinci	5.00%	7.00%	-45.00%	7.00%	102.00%
2020	Kab Tebo	1.00%	7.00%	-11.00%	8.00%	94.00%
2020	Kota Jambi	3.00%	33.00%	100.00%	54.00%	101.00%
2020	Kab Bengkulu Utara	8.00%	7.00%	100.00%	7.00%	101.00%
2020	Kab Mukomuko	9.00%	15.00%	181.00%	11.00%	101.00%
2020	Kab Bengkulu Selatan	6.00%	8.00%	-16.00%	9.00%	102.00%
2020	Kota Bengkulu	8.00%	32.00%	302.00%	17.00%	119.00%
2020	Kab Lahat	-15.00%	1.00%	100.00%	7.00%	103.00%
2020	Kab Musi Banyuasin	-20.00%	-10.00%	-51.00%	6.00%	95.00%

2020	Kab Muara Enim	-14.00%	-11.00%	-101.00%	11.00%	100.00%
2020	Kab Ogan Hilir	2.00%	6.00%	-91.00%	6.00%	105.00%
2020	Kab Banyuasin	-9.00%	1.00%	62.00%	10.00%	115.00%
2020	Kota Lubuk Linggau	0.00%	4.00%	-51.00%	9.00%	99.00%
2020	Kota Palembang	16.00%	18.00%	-2.00%	39.00%	100.00%
2020	Kab Bangka	-27.00%	-19.00%	100.00%	16.00%	101.00%
2020	Kab Belitung	-2.00%	10.00%	100.00%	20.00%	108.00%
2020	Kota Pangkal Pinang	-17.00%	-9.00%	-38.00%	20.00%	105.00%
2020	Kab Pesisir Barat	5.00%	10.00%	-53.00%	4.00%	104.00%
2020	Kab Mesuji	2.00%	4.00%	100.00%	7.00%	101.00%
2020	Kab Lampung Barat	0.00%	2.00%	-33.00%	6.00%	97.00%
2020	Kab Lampung Selatan	2.00%	20.00%	44.00%	15.00%	106.00%
2020	Kab Lampung Utara	6.00%	14.00%	-192.00%	7.00%	99.00%
2020	Kab Lampung Timur	8.00%	17.00%	100.00%	8.00%	103.00%
2020	Kota Bandar Lampung	31.00%	34.00%	-15.00%	33.00%	99.00%
2020	Kab Tangerang	-2.00%	6.00%	-58.00%	87.00%	102.00%
2020	Kab Serang	-4.00%	-5.00%	-61.00%	32.00%	104.00%
2020	Kota Cilegon	4.00%	11.00%	100.00%	69.00%	88.00%
2020	Kota Tangerang	34.00%	42.00%	-9.00%	82.00%	96.00%
2020	Kab Tasikmalaya	-16.00%	-15.00%	-89.00%	9.00%	103.00%
2020	Kab Subang	-1.00%	12.00%	2059.00%	18.00%	97.00%
2020	Kab Purwakarta	7.00%	4.00%	-62.00%	15.00%	99.00%
2020	Kab Sumedang	-8.00%	-7.00%	-122.00%	18.00%	99.00%
2020	Kab Sukabumi	0.00%	2.00%	-54.00%	20.00%	103.00%
2020	Kab Kuningan	-3.00%	0.00%	-107.00%	12.00%	101.00%
2020	Kab Bandung	-23.00%	-13.00%	-15.00%	24.00%	102.00%
2020	Kab Ciamis	-17.00%	-8.00%	-359.00%	11.00%	102.00%
2020	Kota Bekasi	-2.00%	4.00%	-125.00%	67.00%	94.00%
2020	Kota Depok	-5.00%	12.00%	-19.00%	66.00%	105.00%
2020	Kota Cirebon	15.00%	14.00%	-53.00%	37.00%	97.00%
2020	Kab Kendal	5.00%	5.00%	-45.00%	20.00%	96.00%
2020	Kab Jepara	0.00%	9.00%	32.00%	22.00%	98.00%
2020	Kab Karanganyar	2.00%	1.00%	-78.00%	22.00%	99.00%
2020	Kab Kudus	-13.00%	-7.00%	-38.00%	24.00%	95.00%
2020	Kab Klaten	1.00%	8.00%	-51.00%	15.00%	99.00%

2020	Kab Purbalingga	-2.00%	2.00%	-54.00%	19.00%	97.00%
2020	Kab Purworejo	6.00%	14.00%	82.00%	16.00%	98.00%
2020	Kab Semarang	2.00%	6.00%	-48.00%	25.00%	99.00%
2020	Kab Rembang	4.00%	5.00%	-11.00%	21.00%	97.00%
2020	Kab Wonogiri	-4.00%	1.00%	-49.00%	14.00%	100.00%
2020	Kab Wonosobo	-1.00%	2.00%	-44.00%	15.00%	100.00%
2020	Kab Tegal	4.00%	6.00%	-67.00%	20.00%	94.00%
2020	Kab Sukoharjo	-5.00%	13.00%	-10.00%	30.00%	102.00%
2020	Kota Magelang	-5.00%	0.00%	100.00%	44.00%	84.00%
2020	Kota Surakarta	4.00%	5.00%	-48.00%	37.00%	90.00%
2020	Kota Salatiga	4.00%	7.00%	-83.00%	33.00%	106.00%
2020	Kab Malang	1.00%	8.00%	1023.00%	18.00%	102.00%
2020	Kab Mojokerto	-2.00%	2.00%	-73.00%	29.00%	100.00%
2020	Kab Madiun	-2.00%	2.00%	-59.00%	16.00%	98.00%
2020	Kab Lamongan	7.00%	8.00%	-48.00%	20.00%	99.00%
2020	Kab Nganjuk	-5.00%	1.00%	-45.00%	20.00%	98.00%
2020	Kab Ngawi	-1.00%	5.00%	-35.00%	15.00%	101.00%
2020	Kab Ponorogo	2.00%	1.00%	-52.00%	16.00%	99.00%
2020	Kab Pacitan	0.00%	-11.00%	-100.00%	12.00%	97.00%
2020	Kab Sidoarjo	2.00%	23.00%	-19.00%	69.00%	100.00%
2020	Kab Jombang	0.00%	8.00%	-64.00%	23.00%	100.00%
2020	Kab Kediri	-2.00%	14.00%	-9.00%	21.00%	100.00%
2020	Kab Tuban	-2.00%	6.00%	-69.00%	28.00%	96.00%
2020	Kab Jember	4.00%	17.00%	-17.00%	20.00%	93.00%
2020	Kota Pasuruan	-5.00%	-4.00%	14.00%	22.00%	102.00%
2020	Kota Batu	1.00%	6.00%	-100.00%	18.00%	104.00%
2020	Kota Surabaya	4.00%	13.00%	100.00%	132.00%	106.00%
2020	Kota Kediri	-8.00%	9.00%	100.00%	26.00%	94.00%
2020	Kab Bantul	-17.00%	-12.00%	-54.00%	30.00%	99.00%
2020	Kab Sleman	0.00%	8.00%	-58.00%	45.00%	100.00%
2020	Kota Yogyakarta	7.00%	15.00%	-40.00%	50.00%	89.00%
2020	Kab Jembrana	8.00%	9.00%	-66.00%	16.00%	98.00%
2020	Kab Karangasem	1.00%	5.00%	-31.00%	17.00%	99.00%
2020	Kab Gianyar	10.00%	36.00%	3691.00%	41.00%	111.00%
2020	Kota Denpasar	1.00%	8.00%	-28.00%	59.00%	96.00%
2020	Kab Dompu	-1.00%	5.00%	147.00%	13.00%	101.00%
2020	Kab Sumbawa	1.00%	4.00%	0.00%	13.00%	99.00%
2020	Kota Mataram	3.00%	5.00%	-78.00%	35.00%	104.00%
2020	Kota Bima	6.00%	15.00%	-15.00%	7.00%	111.00%
2020	Kab Manggarai Barat	15.00%	18.00%	100.00%	10.00%	103.00%

2020	Kab Sumba Tengah	5.00%	10.00%	-39.00%	6.00%	99.00%
2020	Kab Malaka	1.00%	11.00%	-1.00%	8.00%	107.00%
2020	Kab Alor	6.00%	5.00%	-100.00%	6.00%	99.00%
2020	Kab Belu	7.00%	11.00%	100.00%	10.00%	103.00%
2020	Kab Kupang	5.00%	12.00%	100.00%	6.00%	98.00%
2020	Kab Manggarai	3.00%	6.00%	-134.00%	9.00%	99.00%
2020	Kab Sikka	-3.00%	4.00%	46.00%	12.00%	102.00%
2020	Kota Kupang	3.00%	4.00%	100.00%	17.00%	102.00%
2020	Kab Bengkayang	-1.00%	10.00%	-105.00%	6.00%	96.00%
2020	Kab Landak	6.00%	7.00%	-78.00%	8.00%	99.00%
2020	Kab Melawi	-6.00%	-5.00%	-289.00%	3.00%	102.00%
2020	Kab Kubu Raya	5.00%	8.00%	-4.00%	11.00%	101.00%
2020	Kab Sambas	-2.00%	-2.00%	1.00%	8.00%	101.00%
2020	Kab Ketapang	-9.00%	-9.00%	-118.00%	11.00%	95.00%
2020	Kota Pontianak	2.00%	14.00%	25.00%	35.00%	108.00%
2020	Kab Banjar	-2.00%	9.00%	100.00%	13.00%	103.00%
2020	Kab Barito Kuala	5.00%	4.00%	-91.00%	6.00%	100.00%
2020	Kab Tanah Bumbu	-15.00%	4.00%	2.00%	12.00%	112.00%
2020	Kab Kota Baru	1.00%	7.00%	1385.00%	11.00%	93.00%
2020	Kab Tabalong	-9.00%	-2.00%	1.00%	13.00%	92.00%
2020	Kota Banjarmasin	5.00%	18.00%	-7.00%	21.00%	103.00%
2020	Kab Kapuas	4.00%	40.00%	637.00%	8.00%	103.00%
2020	Kab Katingan	-3.00%	10.00%	100.00%	6.00%	96.00%
2020	Kab Barito Utara	-6.00%	-1.00%	100.00%	7.00%	97.00%
2020	Kab Gunung mas	5.00%	11.00%	-85.00%	7.00%	95.00%
2020	Kota Palangkaraya	6.00%	15.00%	570.00%	19.00%	99.00%
2020	Kab Kutai Barat	-1.00%	18.00%	-67.00%	7.00%	93.00%
2020	Kab Paser	-10.00%	2.00%	-45.00%	8.00%	96.00%
2020	Kab Berau	-17.00%	-17.00%	0.00%	11.00%	111.00%
2020	Kota Balikpapan	3.00%	12.00%	-37.00%	32.00%	85.00%
2020	Kab Nunukan	9.00%	19.00%	-99.00%	11.00%	99.00%
2020	Kota Tarakan	10.00%	41.00%	1685.00%	13.00%	107.00%
2020	Kab Gorontalo	0.00%	1.00%	-25.00%	10.00%	99.00%
2020	Kab Bone Bolango	10.00%	8.00%	-74.00%	8.00%	99.00%
2020	Kota Gorontalo	5.00%	10.00%	-45.00%	34.00%	101.00%
2020	Kab Sinjay	2.00%	18.00%	31.00%	10.00%	107.00%

2020	Kab Kepulauan Selayar	16.00%	18.00%	-69.00%	7.00%	103.00%
2020	Kab Soppeng	-2.00%	1.00%	-81.00%	14.00%	104.00%
2020	Kab Takalar	1.00%	0.00%	-92.00%	14.00%	93.00%
2020	Kab Wajo	0.00%	1.00%	-100.00%	11.00%	99.00%
2020	Kab Pare-Pare	-7.00%	-1.00%	-19.00%	24.00%	101.00%
2020	Kab Toraja Utara	5.00%	5.00%	-100.00%	6.00%	104.00%
2020	Kab Bone	-1.00%	4.00%	-44.00%	13.00%	103.00%
2020	Kab Bulukumba	4.00%	6.00%	11.00%	13.00%	97.00%
2020	Kab Gowa	2.00%	8.00%	20.00%	15.00%	100.00%
2020	Kota Palopo	2.00%	16.00%	1574.00%	22.00%	97.00%
2020	Kab Buton Tengah	8.00%	8.00%	-83.00%	3.00%	95.00%
2020	Kab Kolaka Timur	12.00%	12.00%	-81.00%	4.00%	99.00%
2020	Kab Buton Selatan	2.00%	28.00%	312.00%	3.00%	100.00%
2020	Kab Buton	10.00%	12.00%	100.00%	4.00%	96.00%
2020	Kab Muna	2.00%	5.00%	-227.00%	5.00%	100.00%
2020	Kab Konawe Selatan	9.00%	-1.00%	-171.00%	5.00%	88.00%
2020	Kota Kendari	20.00%	24.00%	121.00%	21.00%	95.00%
2020	Kab Banggai	-1.00%	-1.00%	-39.00%	9.00%	93.00%
2020	Kab Buol	4.00%	4.00%	-115.00%	8.00%	95.00%
2020	Kab Toli-Toli	6.00%	7.00%	-28.00%	10.00%	100.00%
2020	Kab Poso	10.00%	9.00%	-66.00%	9.00%	98.00%
2020	Kota Palu	-40.00%	72.00%	409.00%	25.00%	133.00%
2020	Kab Minahasa	3.00%	11.00%	45.00%	8.00%	102.00%
2020	Kab Sangihe	1.00%	7.00%	4.00%	10.00%	98.00%
2020	Kab Tomohon	17.00%	16.00%	-18.00%	6.00%	99.00%
2020	Kab Minahasa Selatan	4.00%	2.00%	-80.00%	3.00%	102.00%
2020	Kab Kotamobagu	-2.00%	3.00%	100.00%	13.00%	102.00%
2020	Kota Manado	7.00%	22.00%	12.00%	24.00%	112.00%
2020	Kota Bitung	-6.00%	-6.00%	-66.00%	10.00%	101.00%
2020	Kab Mamuju	3.00%	4.00%	100.00%	8.00%	99.00%
2020	Kab Mamasa	5.00%	9.00%	294.00%	3.00%	101.00%
2020	Kab Majene	1.00%	1.00%	-94.00%	9.00%	100.00%
2020	Kab Polewali Mandar	-2.00%	0.00%	0.00%	16.00%	101.00%
2020	Kab Maluku Tengah	2.00%	8.00%	100.00%	6.00%	105.00%

2020	Kab Buru	10.00%	11.00%	-4.00%	4.00%	99.00%
2020	Kab Buru Selatan	4.00%	7.00%	52.00%	3.00%	100.00%
2020	Kab Kepulauan Aru	5.00%	1.00%	-100.00%	7.00%	100.00%
2020	Kota Ambon	10.00%	10.00%	-35.00%	13.00%	100.00%
2020	Kab Halmahera Tengah	14.00%	36.00%	710.00%	8.00%	101.00%
2020	Kab Tidore Kepulauan	1.00%	4.00%	-40.00%	10.00%	91.00%
2020	Kab Halmahera Barat	12.00%	12.00%	15.00%	4.00%	95.00%
2020	Kota Ternate	12.00%	16.00%	-461.00%	9.00%	100.00%
2020	Kab Mappi	-11.00%	-6.00%	-32.00%	3.00%	100.00%
2020	Kab Tolikara	5.00%	-8.00%	-86.00%	1.00%	97.00%
2020	Kab Keerom	-1.00%	-5.00%	-1919.00%	2.00%	99.00%
2020	Kab Yahukimo	-5.00%	-3.00%	-52.00%	1.00%	103.00%
2020	Kab Yalimo	-1.00%	-1.00%	-7.00%	1.00%	93.00%
2020	Kab Nduga	2.00%	-27.00%	-100.00%	1.00%	89.00%
2020	Kab Lanny Jaya	0.00%	6.00%	48.00%	1.00%	102.00%
2020	Kab Jayapura	6.00%	4.00%	100.00%	7.00%	89.00%
2020	Kab Jayawijaya	-2.00%	6.00%	100.00%	5.00%	100.00%
2020	Kab Deiyai	4.00%	-3.00%	-180.00%	0.00%	103.00%
2020	Kab Intan Jaya	-1.00%	2.00%	-100.00%	2.00%	103.00%
2020	Kab Biak Numfor	3.00%	7.00%	-67.00%	9.00%	103.00%
2020	Kota Jayapura	6.00%	4.00%	100.00%	16.00%	90.00%
2020	Kab Fak-Fak	-4.00%	-2.00%	-73.00%	4.00%	100.00%
2020	Kab Manokwari	2.00%	7.00%	-41.00%	7.00%	103.00%
2020	Kab Sorong	-7.00%	-3.00%	-54.00%	6.00%	99.00%
2020	Kab Pegunungan Arfak	1.00%	12.00%	-102.00%	1.00%	100.00%
2020	Kab Raja Ampat	-5.00%	-7.00%	-100.00%	1.00%	100.00%
2020	Kota Sorong	5.00%	-4.00%	-954.00%	12.00%	104.00%
2021	Kab Gayo Lues	-4.00%	-2.00%	100.00%	8.00%	100.00%
2021	Kab Pidie	2.00%	3.00%	0.00%	12.00%	94.00%
2021	Kab Aceh Jaya	6.00%	8.00%	-50.00%	9.00%	99.00%
2021	Kab Pidie Jaya	2.00%	-5.00%	-99.00%	10.00%	101.00%
2021	Kab Aceh Barat	-8.00%	-19.00%	-26834.00%	11.00%	100.00%
2021	Kab Aceh Besar	1.00%	4.00%	-24.00%	10.00%	104.00%
2021	Kab Bener Meriah	7.00%	7.00%	0.00%	7.00%	98.00%
2021	Kab Aceh Utara	-2.00%	1.00%	0.00%	8.00%	97.00%

2021	Kota Banda Aceh	5.00%	4.00%	-104.00%	23.00%	100.00%
2021	Kota Sabang	6.00%	22.00%	-100.00%	10.00%	110.00%
2021	Kab Tapanuli Tengah	2.00%	-7.00%	-126.00%	8.00%	100.00%
2021	Kab Toba Samosir	9.00%	11.00%	-78.00%	8.00%	94.00%
2021	Kab Batu Bara	-4.00%	1.00%	-42.00%	18.00%	103.00%
2021	Kab Samosir	13.00%	15.00%	-35.00%	8.00%	96.00%
2021	Kab Nias Barat	-3.00%	0.00%	-38.00%	3.00%	97.00%
2021	Kab Nias Utara	9.00%	10.00%	-100.00%	3.00%	99.00%
2021	Kab.Labuhanbatu Sel	7.00%	19.00%	43.00%	22.00%	94.00%
2021	Kab. Dairi	10.00%	14.00%	-58.00%	7.00%	99.00%
2021	Kab.Deli Serdang	20.00%	23.00%	-66.00%	35.00%	98.00%
2021	Kab Nias	-14.00%	-13.00%	-78.00%	13.00%	95.00%
2021	Kab Simalungun	8.00%	5.00%	-240.00%	9.00%	92.00%
2021	Kota Binjai	16.00%	16.00%	-143.00%	12.00%	101.00%
2021	Kota Medan	26.00%	34.00%	-70.00%	61.00%	90.00%
2021	Kota Tebing Tinggi	12.00%	19.00%	65.00%	14.00%	97.00%
2021	Kota Sibolga	-2.00%	6.00%	-100.00%	15.00%	99.00%
2021	Kab Dharmasraya	-4.00%	5.00%	2150.00%	9.00%	94.00%
2021	Kab Pasaman Barat	6.00%	14.00%	29.00%	13.00%	93.00%
2021	Kab Solok	10.00%	13.00%	-27.00%	7.00%	95.00%
2021	Kab Pesisir Selatan	6.00%	7.00%	-172.00%	9.00%	95.00%
2021	Kab Agam	5.00%	12.00%	31.00%	10.00%	97.00%
2021	Kota Padang	21.00%	24.00%	34.00%	32.00%	100.00%
2021	Kota Solok	3.00%	25.00%	28.00%	8.00%	104.00%
2021	Kota Pariaman	1.00%	4.00%	-100.00%	7.00%	100.00%
2021	Kab Kampar	-1.00%	-4.00%	-100.00%	12.00%	101.00%
2021	Kab Pelalawan	-18.00%	-13.00%	-50.00%	11.00%	103.00%
2021	Kab Indragiri Hilir	-13.00%	2.00%	478.00%	13.00%	95.00%
2021	Kab Siak	15.00%	-4.00%	-100.00%	16.00%	90.00%
2021	Kota Pekanbaru	11.00%	11.00%	-100.00%	41.00%	99.00%
2021	Kab Karimun	-1.00%	6.00%	208.00%	53.00%	92.00%
2021	Kab Natuna	5.00%	3.00%	-89.00%	5.00%	98.00%
2021	Kota Tanjung Pinang	-14.00%	2.00%	-100.00%	17.00%	100.00%
2021	Kab Batanghari	10.00%	11.00%	-33.00%	12.00%	93.00%

2021	Kab Muaro Jambi	1.00%	0.00%	-43.00%	9.00%	96.00%
2021	Kab Kerinci	1.00%	0.00%	-75.00%	6.00%	96.00%
2021	Kab Tebo	-4.00%	8.00%	7.00%	9.00%	98.00%
2021	Kota Jambi	2.00%	24.00%	98.00%	30.00%	105.00%
2021	Kab Bengkulu Utara	4.00%	4.00%	-85.00%	9.00%	91.00%
2021	Kab Mukomuko	3.00%	3.00%	-19.00%	7.00%	93.00%
2021	Kab Bengkulu Selatan	-6.00%	-5.00%	12.00%	8.00%	95.00%
2021	Kota Bengkulu	9.00%	-13.00%	-128.00%	18.00%	94.00%
2021	Kab Lahat	-7.00%	-1.00%	-53.00%	8.00%	96.00%
2021	Kab Musi Banyuasin	-10.00%	-10.00%	-129.00%	12.00%	109.00%
2021	Kab Muara Enim	1.00%	-1.00%	-100.00%	10.00%	88.00%
2021	Kab Ogan Hilir	-3.00%	-8.00%	-91.00%	8.00%	94.00%
2021	Kab Banyuasin	-2.00%	6.00%	56.00%	11.00%	102.00%
2021	Kota Lubuk Linggau	-6.00%	14.00%	-4836.00%	16.00%	99.00%
2021	Kota Palembang	13.00%	17.00%	220.00%	46.00%	96.00%
2021	Kab Bangka	-3.00%	11.00%	-100.00%	15.00%	99.00%
2021	Kab Belitung	1.00%	7.00%	-31.00%	22.00%	98.00%
2021	Kota Pangkal Pinang	6.00%	5.00%	-68.00%	22.00%	95.00%
2021	Kab Pesisir Barat	12.00%	10.00%	-73.00%	4.00%	103.00%
2021	Kab Mesuji	3.00%	10.00%	-44.00%	7.00%	103.00%
2021	Kab Lampung Barat	3.00%	8.00%	-12.00%	8.00%	102.00%
2021	Kab Lampung Selatan	0.00%	-2.00%	-100.00%	17.00%	104.00%
2021	Kab Lampung Utara	2.00%	5.00%	-41.00%	7.00%	101.00%
2021	Kab Lampung Timur	17.00%	22.00%	-11.00%	8.00%	105.00%
2021	Kota Bandar Lampung	26.00%	13.00%	4429.00%	36.00%	95.00%
2021	Kab Tangerang	4.00%	8.00%	-100.00%	88.00%	95.00%
2021	Kab Serang	1.00%	3.00%	-2.00%	34.00%	97.00%
2021	Kota Cilegon	0.00%	29.00%	84.00%	55.00%	93.00%
2021	Kota Tangerang	15.00%	30.00%	-100.00%	80.00%	98.00%
2021	Kab Tasikmalaya	-11.00%	-11.00%	-100.00%	13.00%	98.00%
2021	Kab Subang	1.00%	5.00%	3766.00%	19.00%	99.00%
2021	Kab Purwakarta	6.00%	10.00%	87.00%	27.00%	100.00%

2021	Kab Sumedang	-25.00%	-25.00%	-109.00%	20.00%	96.00%
2021	Kab Sukabumi	2.00%	-1.00%	-105.00%	19.00%	97.00%
2021	Kab Kuningan	-8.00%	-9.00%	-135.00%	14.00%	99.00%
2021	Kab Bandung	-22.00%	-15.00%	-25.00%	24.00%	96.00%
2021	Kab Ciamis	-11.00%	-11.00%	-64.00%	11.00%	101.00%
2021	Kota Bekasi	16.00%	28.00%	-57.00%	79.00%	99.00%
2021	Kota Depok	-3.00%	12.00%	-100.00%	83.00%	96.00%
2021	Kota Cirebon	-12.00%	-8.00%	-1163.00%	42.00%	99.00%
2021	Kab Kendal	7.00%	13.00%	-63.00%	24.00%	90.00%
2021	Kab Jepara	-14.00%	-6.00%	-16.00%	21.00%	97.00%
2021	Kab Karanganyar	-1.00%	2.00%	-80.00%	25.00%	99.00%
2021	Kab Kudus	-16.00%	-3.00%	-17.00%	31.00%	87.00%
2021	Kab Klaten	29.00%	43.00%	56.00%	14.00%	97.00%
2021	Kab Purbalingga	-23.00%	-21.00%	-90.00%	23.00%	97.00%
2021	Kab Purworejo	3.00%	5.00%	-88.00%	24.00%	93.00%
2021	Kab Semarang	-10.00%	-5.00%	-44.00%	31.00%	91.00%
2021	Kab Rembang	-6.00%	0.00%	263.00%	27.00%	96.00%
2021	Kab Wonogiri	1.00%	6.00%	-56.00%	12.00%	100.00%
2021	Kab Wonosobo	1.00%	5.00%	-56.00%	21.00%	95.00%
2021	Kab Tegal	5.00%	16.00%	71.00%	26.00%	97.00%
2021	Kab Sukoharjo	-4.00%	8.00%	-25.00%	33.00%	99.00%
2021	Kota Magelang	-4.00%	23.00%	-30.00%	47.00%	94.00%
2021	Kota Surakarta	6.00%	20.00%	-63.00%	41.00%	96.00%
2021	Kota Salatiga	4.00%	4.00%	-76.00%	42.00%	101.00%
2021	Kab Malang	5.00%	10.00%	-35.00%	20.00%	95.00%
2021	Kab Mojokerto	2.00%	6.00%	-100.00%	26.00%	97.00%
2021	Kab Madiun	-1.00%	2.00%	-87.00%	20.00%	94.00%
2021	Kab Lamongan	3.00%	4.00%	-77.00%	26.00%	97.00%
2021	Kab Nganjuk	-12.00%	-2.00%	-36.00%	22.00%	92.00%
2021	Kab Ngawi	0.00%	6.00%	-32.00%	15.00%	99.00%
2021	Kab Ponorogo	-2.00%	7.00%	108.00%	19.00%	91.00%
2021	Kab Pacitan	2.00%	6.00%	-58.00%	14.00%	95.00%
2021	Kab Sidoarjo	-5.00%	20.00%	-1.00%	70.00%	106.00%
2021	Kab Jombang	3.00%	9.00%	-69.00%	30.00%	97.00%
2021	Kab Kediri	-2.00%	12.00%	-31.00%	21.00%	100.00%
2021	Kab Tuban	-8.00%	0.00%	-76.00%	30.00%	92.00%
2021	Kab Jember	5.00%	35.00%	-100.00%	22.00%	105.00%
2021	Kota Pasuruan	-4.00%	33.00%	33.00%	19.00%	102.00%
2021	Kota Batu	12.00%	17.00%	-71.00%	18.00%	102.00%
2021	Kota Surabaya	15.00%	22.00%	45.00%	131.00%	94.00%

2021	Kota Kediri	-4.00%	18.00%	-100.00%	41.00%	89.00%
2021	Kab Bantul	4.00%	12.00%	-36.00%	28.00%	100.00%
2021	Kab Sleman	8.00%	14.00%	-60.00%	40.00%	97.00%
2021	Kota Yogyakarta	-1.00%	17.00%	-53.00%	54.00%	99.00%
2021	Kab Jembrana	-2.00%	3.00%	-64.00%	21.00%	97.00%
2021	Kab Karangasem	9.00%	12.00%	-57.00%	19.00%	99.00%
2021	Kab Gianyar	9.00%	27.00%	159.00%	38.00%	121.00%
2021	Kota Denpasar	-5.00%	4.00%	-57.00%	66.00%	96.00%
2021	Kab Dompu	4.00%	4.00%	-81.00%	13.00%	98.00%
2021	Kab Sumbawa	2.00%	4.00%	-91.00%	14.00%	102.00%
2021	Kota Mataram	2.00%	-1.00%	-81.00%	38.00%	97.00%
2021	Kota Bima	5.00%	-4.00%	-85.00%	7.00%	98.00%
2021	Kab Manggarai Barat	12.00%	11.00%	-68.00%	17.00%	101.00%
2021	Kab Sumba Tengah	3.00%	8.00%	-33.00%	5.00%	104.00%
2021	Kab Malaka	17.00%	12.00%	-80.00%	7.00%	92.00%
2021	Kab Alor	2.00%	2.00%	-112.00%	49.00%	98.00%
2021	Kab Belu	-4.00%	-3.00%	-33.00%	9.00%	97.00%
2021	Kab Kupang	4.00%	11.00%	-42.00%	7.00%	102.00%
2021	Kab Manggarai	2.00%	2.00%	-123.00%	9.00%	99.00%
2021	Kab Sikka	8.00%	33.00%	424.00%	9.00%	99.00%
2021	Kota Kupang	4.00%	11.00%	-42.00%	18.00%	102.00%
2021	Kab Bengkayang	1.00%	8.00%	-66.00%	6.00%	101.00%
2021	Kab Landak	-9.00%	-5.00%	-36.00%	8.00%	96.00%
2021	Kab Melawi	8.00%	9.00%	-3.00%	5.00%	98.00%
2021	Kab Kubu Raya	-3.00%	7.00%	163.00%	12.00%	107.00%
2021	Kab Sambas	4.00%	4.00%	-57.00%	9.00%	100.00%
2021	Kab Ketapang	-1.00%	5.00%	-115.00%	13.00%	90.00%
2021	Kota Pontianak	14.00%	11.00%	-40.00%	36.00%	104.00%
2021	Kab Banjar	-1.00%	8.00%	14.00%	15.00%	102.00%
2021	Kab Barito Kuala	-9.00%	-7.00%	-85.00%	9.00%	99.00%
2021	Kab Tanah Bumbu	-8.00%	2.00%	0.00%	11.00%	108.00%
2021	Kab Kota Baru	6.00%	18.00%	142.00%	14.00%	94.00%
2021	Kab Tabalong	-16.00%	2.00%	-100.00%	15.00%	106.00%
2021	Kota Banjarmasin	-9.00%	-1.00%	-100.00%	29.00%	103.00%
2021	Kab Kapuas	0.00%	27.00%	292.00%	9.00%	96.00%
2021	Kab Katingan	4.00%	22.00%	12.00%	6.00%	99.00%
2021	Kab Barito Utara	-6.00%	2.00%	-100.00%	9.00%	89.00%

2021	Kab Gunung mas	4.00%	11.00%	-34.00%	9.00%	96.00%
2021	Kota Palangkaraya	-2.00%	2.00%	-78.00%	30.00%	93.00%
2021	Kab Kutai Barat	-2.00%	7.00%	-86.00%	8.00%	109.00%
2021	Kab Paser	-28.00%	-17.00%	-56.00%	14.00%	106.00%
2021	Kab Berau	-21.00%	-29.00%	-100.00%	14.00%	100.00%
2021	Kota Balikpapan	-13.00%	6.00%	-66.00%	50.00%	104.00%
2021	Kab Nunukan	-4.00%	-1.00%	75.00%	14.00%	96.00%
2021	Kota Tarakan	3.00%	1.00%	-62.00%	16.00%	91.00%
2021	Kab Gorontalo	3.00%	40.00%	-100.00%	10.00%	114.00%
2021	Kab Bone Bolango	12.00%	12.00%	-374.00%	10.00%	96.00%
2021	Kota Gorontalo	10.00%	43.00%	413.00%	40.00%	98.00%
2021	Kab Sinjay	7.00%	2.00%	-90.00%	9.00%	101.00%
2021	Kab Kepulauan Selayar	11.00%	10.00%	-79.00%	6.00%	100.00%
2021	Kab Soppeng	0.00%	-4.00%	-102.00%	15.00%	92.00%
2021	Kab Takalar	10.00%	21.00%	-51.00%	12.00%	102.00%
2021	Kab Wajo	4.00%	11.00%	315.00%	11.00%	102.00%
2021	Kab Pare-Pare	11.00%	13.00%	-48.00%	23.00%	102.00%
2021	Kab Toraja Utara	11.00%	7.00%	-100.00%	5.00%	101.00%
2021	Kab Bone	-1.00%	19.00%	261.00%	8.00%	99.00%
2021	Kab Bulukumba	3.00%	7.00%	129.00%	13.00%	99.00%
2021	Kab Gowa	-2.00%	14.00%	105.00%	16.00%	96.00%
2021	Kota Palopo	1.00%	5.00%	-80.00%	18.00%	100.00%
2021	Kab Buton Tengah	-2.00%	12.00%	15.00%	3.00%	92.00%
2021	Kab Kolaka Timur	0.00%	2.00%	-83.00%	4.00%	92.00%
2021	Kab Buton Selatan	-1.00%	14.00%	181.00%	3.00%	105.00%
2021	Kab Buton	4.00%	27.00%	330.00%	5.00%	111.00%
2021	Kab Muna	7.00%	40.00%	1006.00%	6.00%	99.00%
2021	Kab Konawe Selatan	1.00%	13.00%	-88.00%	6.00%	87.00%
2021	Kota Kendari	20.00%	53.00%	704.00%	27.00%	104.00%
2021	Kab Banggai	-2.00%	10.00%	487.00%	10.00%	95.00%
2021	Kab Buol	-4.00%	2.00%	227.00%	6.00%	97.00%
2021	Kab Toli-Toli	9.00%	9.00%	-100.00%	13.00%	98.00%
2021	Kab Poso	-3.00%	-1.00%	-100.00%	9.00%	100.00%
2021	Kota Palu	-6.00%	-6.00%	-61.00%	33.00%	116.00%
2021	Kab Minahasa	2.00%	7.00%	31.00%	8.00%	100.00%

2021	Kab Sangihe	-4.00%	3.00%	-100.00%	9.00%	96.00%
2021	Kab Tomohon	-2.00%	0.00%	87.00%	10.00%	92.00%
2021	Kab Minahasa Selatan	5.00%	3.00%	-100.00%	3.00%	97.00%
2021	Kab Kotamobagu	-3.00%	-2.00%	-100.00%	17.00%	96.00%
2021	Kota Manado	10.00%	5.00%	-34.00%	26.00%	98.00%
2021	Kota Bitung	13.00%	12.00%	-112.00%	8.00%	85.00%
2021	Kab Mamuju	7.00%	8.00%	-100.00%	6.00%	94.00%
2021	Kab Mamasa	-1.00%	1.00%	107.00%	2.00%	103.00%
2021	Kab Majene	0.00%	-2.00%	-136.00%	10.00%	96.00%
2021	Kab Polewali Mandar	-2.00%	1.00%	-100.00%	21.00%	99.00%
2021	Kab Maluku Tengah	7.00%	5.00%	-70.00%	6.00%	103.00%
2021	Kab Buru	-3.00%	-3.00%	22.00%	4.00%	98.00%
2021	Kab Buru Selatan	10.00%	14.00%	53.00%	3.00%	97.00%
2021	Kab Kepulauan Aru	6.00%	6.00%	-99.00%	5.00%	100.00%
2021	Kota Ambon	11.00%	13.00%	393.00%	16.00%	100.00%
2021	Kab Halmahera Tengah	47.00%	50.00%	280.00%	9.00%	94.00%
2021	Kab Tidore Kepulauan	-4.00%	16.00%	167.00%	7.00%	100.00%
2021	Kab Halmahera Barat	3.00%	8.00%	-88.00%	5.00%	99.00%
2021	Kota Ternate	5.00%	6.00%	-100.00%	10.00%	98.00%
2021	Kab Mappi	4.00%	4.00%	-102.00%	2.00%	98.00%
2021	Kab Tolikara	-1.00%	7.00%	67.00%	1.00%	102.00%
2021	Kab Keerom	5.00%	0.00%	1482.00%	3.00%	92.00%
2021	Kab Yahukimo	8.00%	5.00%	-100.00%	1.00%	99.00%
2021	Kab Yalimo	-6.00%	2.00%	-100.00%	1.00%	96.00%
2021	Kab Nduga	-6.00%	5.00%	-90.00%	1.00%	108.00%
2021	Kab Lanny Jaya	5.00%	4.00%	-100.00%	1.00%	100.00%
2021	Kab Jayapura	-14.00%	13.00%	122.00%	11.00%	107.00%
2021	Kab Jayawijaya	5.00%	10.00%	-100.00%	3.00%	96.00%
2021	Kab Deiyai	-3.00%	-9.00%	-190.00%	1.00%	102.00%
2021	Kab Intan Jaya	10.00%	7.00%	-100.00%	2.00%	104.00%
2021	Kab Biak Numfor	7.00%	5.00%	-70.00%	6.00%	104.00%
2021	Kota Jayapura	0.00%	12.00%	-72.00%	24.00%	104.00%
2021	Kab Fak-Fak	-11.00%	-7.00%	-50.00%	3.00%	98.00%
2021	Kab Manokwari	-4.00%	-5.00%	-63.00%	10.00%	109.00%

2021	Kab Sorong	-22.00%	-23.00%	-113.00%	6.00%	100.00%
2021	Kab Pegunungan Arfak	-20.00%	-9.00%	-41.00%	1.00%	111.00%
2021	Kab Raja Ampat	14.00%	14.00%	-118.00%	2.00%	99.00%
2021	Kota Sorong	8.00%	-8.00%	-314.00%	21.00%	96.00%
2022	Kab Gayo Lues	-6.00%	-6.00%	100.00%	13.00%	102.00%
2022	Kab Pidie	-6.00%	4.00%	0.00%	13.00%	106.00%
2022	Kab Aceh Jaya	-6.00%	-3.00%	-56.00%	12.00%	97.00%
2022	Kab Pidie Jaya	2.00%	1.00%	-103.00%	11.00%	93.00%
2022	Kab Aceh Barat	12.00%	12.00%	-6864.00%	12.00%	100.00%
2022	Kab Aceh Besar	-1.00%	1.00%	-1.00%	10.00%	100.00%
2022	Kab Bener Meriah	-10.00%	-7.00%	0.00%	7.00%	102.00%
2022	Kab Aceh Utara	-1.00%	4.00%	0.00%	8.00%	102.00%
2022	Kota Banda Aceh	14.00%	14.00%	-44.00%	27.00%	85.00%
2022	Kota Sabang	1.00%	13.00%	100.00%	10.00%	101.00%
2022	Kab Tapanuli Tengah	2.00%	-1.00%	-121.00%	7.00%	99.00%
2022	Kab Toba Samosir	-1.00%	11.00%	-3.00%	8.00%	103.00%
2022	Kab Batu Bara	-2.00%	6.00%	-12.00%	12.00%	106.00%
2022	Kab Samosir	-2.00%	4.00%	-37.00%	8.00%	99.00%
2022	Kab Nias Barat	13.00%	22.00%	-11.00%	3.00%	142.00%
2022	Kab Nias Utara	2.00%	21.00%	100.00%	2.00%	110.00%
2022	Kab.Labuhanbatu Sel	-6.00%	7.00%	-62.00%	7.00%	102.00%
2022	Kab. Dairi	0.00%	4.00%	-65.00%	8.00%	97.00%
2022	Kab.Deli Serdang	19.00%	22.00%	-79.00%	39.00%	100.00%
2022	Kab Nias	3.00%	12.00%	-100.00%	12.00%	102.00%
2022	Kab Simalungun	8.00%	16.00%	-58.00%	8.00%	97.00%
2022	Kota Binjai	17.00%	16.00%	-137.00%	9.00%	102.00%
2022	Kota Medan	28.00%	49.00%	-100.00%	63.00%	111.00%
2022	Kota Tebing Tinggi	5.00%	9.00%	-86.00%	15.00%	103.00%
2022	Kota Sibolga	13.00%	32.00%	18.00%	15.00%	114.00%
2022	Kab Dharmasraya	-11.00%	2.00%	-100.00%	11.00%	101.00%
2022	Kab Pasaman Barat	-3.00%	7.00%	-26.00%	11.00%	98.00%
2022	Kab Solok	-1.00%	8.00%	-100.00%	6.00%	78.00%
2022	Kab Pesisir Selatan	-3.00%	4.00%	85.00%	9.00%	99.00%
2022	Kab Agam	0.00%	10.00%	16.00%	13.00%	104.00%

2022	Kota Padang	19.00%	26.00%	846.00%	39.00%	95.00%
2022	Kota Solok	-2.00%	29.00%	107.00%	3.00%	145.00%
2022	Kota Pariaman	1.00%	6.00%	100.00%	1.00%	131.00%
2022	Kab Kampar	-3.00%	-1.00%	0.00%	14.00%	100.00%
2022	Kab Pelalawan	-18.00%	-1.00%	-100.00%	14.00%	107.00%
2022	Kab Indragiri Hilir	-11.00%	5.00%	-100.00%	10.00%	102.00%
2022	Kab Siak	-8.00%	12.00%	0.00%	12.00%	114.00%
2022	Kota Pekanbaru	10.00%	10.00%	-100.00%	48.00%	101.00%
2022	Kab Karimun	-8.00%	3.00%	-100.00%	36.00%	105.00%
2022	Kab Natuna	5.00%	9.00%	1.00%	7.00%	103.00%
2022	Kota Tanjung Pinang	-3.00%	6.00%	0.00%	21.00%	98.00%
2022	Kab Batanghari	1.00%	32.00%	3317.00%	9.00%	104.00%
2022	Kab Muaro Jambi	-4.00%	4.00%	69.00%	11.00%	103.00%
2022	Kab Kerinci	-7.00%	-2.00%	-49.00%	4.00%	98.00%
2022	Kab Tebo	-2.00%	0.00%	-103.00%	7.00%	127.00%
2022	Kota Jambi	2.00%	2.00%	-66.00%	33.00%	93.00%
2022	Kab Bengkulu Utara	-10.00%	1.00%	-34.00%	9.00%	106.00%
2022	Kab Mukomuko	-2.00%	8.00%	-100.00%	7.00%	101.00%
2022	Kab Bengkulu Selatan	-7.00%	2.00%	-100.00%	7.00%	100.00%
2022	Kota Bengkulu	4.00%	4.00%	837.00%	21.00%	94.00%
2022	Kab Lahat	-13.00%	-5.00%	-69.00%	7.00%	95.00%
2022	Kab Musi Banyuasin	-9.00%	-22.00%	-139.00%	12.00%	101.00%
2022	Kab Muara Enim	-6.00%	11.00%	-65.00%	3.00%	103.00%
2022	Kab Ogan Hilir	-2.00%	4.00%	-100.00%	8.00%	96.00%
2022	Kab Banyuasin	-3.00%	-10.00%	-266.00%	12.00%	96.00%
2022	Kota Lubuk Linggau	-15.00%	-4.00%	353.00%	6.00%	81.00%
2022	Kota Palembang	4.00%	8.00%	-163.00%	53.00%	99.00%
2022	Kab Bangka	-4.00%	8.00%	100.00%	17.00%	99.00%
2022	Kab Belitung	-6.00%	8.00%	-1.00%	20.00%	97.00%
2022	Kota Pangkal Pinang	-7.00%	1.00%	-64.00%	26.00%	97.00%
2022	Kab Pesisir Barat	13.00%	9.00%	-112.00%	4.00%	100.00%
2022	Kab Mesuji	4.00%	9.00%	-28.00%	9.00%	102.00%
2022	Kab Lampung Barat	3.00%	9.00%	3.00%	7.00%	106.00%

2022	Kab Lampung Selatan	4.00%	2.00%	100.00%	17.00%	106.00%
2022	Kab Lampung Utara	7.00%	13.00%	73.00%	4.00%	108.00%
2022	Kab Lampung Timur	6.00%	8.00%	13.00%	10.00%	99.00%
2022	Kota Bandar Lampung	10.00%	12.00%	-7.00%	91.00%	167.00%
2022	Kab Tangerang	-7.00%	3.00%	100.00%	116.00%	98.00%
2022	Kab Serang	-1.00%	7.00%	313.00%	35.00%	101.00%
2022	Kota Cilegon	0.00%	34.00%	31.00%	71.00%	106.00%
2022	Kota Tangerang	7.00%	20.00%	100.00%	105.00%	125.00%
2022	Kab Tasikmalaya	-26.00%	2.00%	100.00%	11.00%	101.00%
2022	Kab Subang	-6.00%	-3.00%	14.00%	19.00%	102.00%
2022	Kab Purwakarta	-1.00%	1.00%	18.00%	33.00%	99.00%
2022	Kab Sumedang	-2.00%	2.00%	-111.00%	24.00%	99.00%
2022	Kab Sukabumi	-6.00%	-3.00%	-151.00%	21.00%	99.00%
2022	Kab Kuningan	-3.00%	-3.00%	-176.00%	15.00%	101.00%
2022	Kab Bandung	-22.00%	-11.00%	-17.00%	29.00%	95.00%
2022	Kab Ciamis	-9.00%	1.00%	302.00%	13.00%	104.00%
2022	Kota Bekasi	-3.00%	13.00%	13.00%	87.00%	92.00%
2022	Kota Depok	-9.00%	8.00%	100.00%	81.00%	99.00%
2022	Kota Cirebon	8.00%	8.00%	-119.00%	58.00%	97.00%
2022	Kab Kendal	6.00%	21.00%	-64.00%	24.00%	110.00%
2022	Kab Jepara	1.00%	12.00%	-16.00%	23.00%	104.00%
2022	Kab Karanganyar	-3.00%	-1.00%	-88.00%	29.00%	98.00%
2022	Kab Kudus	-9.00%	14.00%	-39.00%	25.00%	107.00%
2022	Kab Klaten	-3.00%	8.00%	-52.00%	16.00%	98.00%
2022	Kab Purbalingga	-2.00%	4.00%	-66.00%	18.00%	105.00%
2022	Kab Purworejo	2.00%	16.00%	20.00%	18.00%	107.00%
2022	Kab Semarang	1.00%	17.00%	-36.00%	26.00%	109.00%
2022	Kab Rembang	-2.00%	20.00%	462.00%	24.00%	108.00%
2022	Kab Wonogiri	-5.00%	0.00%	-59.00%	17.00%	99.00%
2022	Kab Wonosobo	-2.00%	7.00%	-57.00%	16.00%	105.00%
2022	Kab Tegal	-6.00%	3.00%	-16.00%	24.00%	99.00%
2022	Kab Sukoharjo	-11.00%	2.00%	-31.00%	33.00%	101.00%
2022	Kota Magelang	-18.00%	-4.00%	-68.00%	62.00%	105.00%
2022	Kota Surakarta	10.00%	20.00%	-57.00%	47.00%	103.00%
2022	Kota Salatiga	-7.00%	-4.00%	-75.00%	36.00%	101.00%
2022	Kab Malang	3.00%	17.00%	1.00%	23.00%	108.00%
2022	Kab Mojokerto	-10.00%	0.00%	0.00%	36.00%	103.00%

2022	Kab Madiun	-5.00%	5.00%	-58.00%	23.00%	103.00%
2022	Kab Lamongan	0.00%	9.00%	176.00%	21.00%	109.00%
2022	Kab Nganjuk	-17.00%	1.00%	-24.00%	22.00%	107.00%
2022	Kab Ngawi	-5.00%	4.00%	-12.00%	16.00%	102.00%
2022	Kab Ponorogo	-1.00%	19.00%	111.00%	17.00%	109.00%
2022	Kab Pacitan	-3.00%	3.00%	-100.00%	11.00%	86.00%
2022	Kab Sidoarjo	-4.00%	10.00%	-15.00%	67.00%	108.00%
2022	Kab Jombang	-11.00%	-2.00%	-70.00%	24.00%	107.00%
2022	Kab Kediri	-5.00%	9.00%	-28.00%	27.00%	103.00%
2022	Kab Tuban	-8.00%	7.00%	-100.00%	28.00%	103.00%
2022	Kab Jember	7.00%	18.00%	100.00%	21.00%	112.00%
2022	Kota Pasuruan	-1.00%	23.00%	2.00%	22.00%	103.00%
2022	Kota Batu	-5.00%	13.00%	-26.00%	25.00%	99.00%
2022	Kota Surabaya	14.00%	33.00%	172.00%	153.00%	107.00%
2022	Kota Kediri	-18.00%	14.00%	0.00%	28.00%	102.00%
2022	Kab Bantul	-4.00%	1.00%	-59.00%	31.00%	101.00%
2022	Kab Sleman	4.00%	12.00%	-61.00%	55.00%	101.00%
2022	Kota Yogyakarta	0.00%	6.00%	-72.00%	62.00%	97.00%
2022	Kab Jembrana	0.00%	7.00%	-61.00%	19.00%	103.00%
2022	Kab Karangasem	-1.00%	3.00%	-57.00%	24.00%	98.00%
2022	Kab Gianyar	38.00%	21.00%	-60.00%	69.00%	101.00%
2022	Kota Denpasar	-1.00%	17.00%	-9.00%	73.00%	96.00%
2022	Kab Dompu	4.00%	9.00%	-46.00%	62.00%	81.00%
2022	Kab Sumbawa	9.00%	9.00%	-57.00%	11.00%	100.00%
2022	Kota Mataram	-1.00%	3.00%	-61.00%	42.00%	98.00%
2022	Kota Bima	5.00%	8.00%	45.00%	8.00%	93.00%
2022	Kab Manggarai Barat	30.00%	48.00%	1057.00%	14.00%	92.00%
2022	Kab Sumba Tengah	16.00%	15.00%	-39.00%	4.00%	98.00%
2022	Kab Malaka	-6.00%	5.00%	-8.00%	5.00%	104.00%
2022	Kab Alor	-2.00%	0.00%	-113.00%	7.00%	99.00%
2022	Kab Belu	10.00%	17.00%	40.00%	9.00%	99.00%
2022	Kab Kupang	8.00%	12.00%	-30.00%	5.00%	105.00%
2022	Kab Manggarai	2.00%	27.00%	408.00%	11.00%	103.00%
2022	Kab Sikka	5.00%	23.00%	111.00%	10.00%	112.00%
2022	Kota Kupang	-4.00%	-4.00%	-79.00%	22.00%	97.00%
2022	Kab Bengkayang	0.00%	24.00%	81.00%	8.00%	119.00%
2022	Kab Landak	-4.00%	4.00%	-33.00%	6.00%	103.00%
2022	Kab Melawi	-9.00%	-5.00%	118.00%	5.00%	101.00%
2022	Kab Kubu Raya	-1.00%	0.00%	-7.00%	15.00%	105.00%

2022	Kab Sambas	-5.00%	-6.00%	-123.00%	11.00%	131.00%
2022	Kab Ketapang	-18.00%	-5.00%	-56.00%	11.00%	101.00%
2022	Kota Pontianak	15.00%	11.00%	-85.00%	46.00%	98.00%
2022	Kab Banjar	-24.00%	-15.00%	42.00%	7.00%	75.00%
2022	Kab Barito Kuala	-1.00%	2.00%	-78.00%	4.00%	130.00%
2022	Kab Tanah Bumbu	0.00%	0.00%	-13.00%	7.00%	167.00%
2022	Kab Kota Baru	-9.00%	2.00%	-31.00%	14.00%	92.00%
2022	Kab Tabalong	-7.00%	-1.00%	100.00%	9.00%	138.00%
2022	Kota Banjarmasin	12.00%	25.00%	100.00%	25.00%	101.00%
2022	Kab Kapuas	2.00%	20.00%	160.00%	7.00%	91.00%
2022	Kab Katingan	-1.00%	14.00%	2.00%	6.00%	105.00%
2022	Kab Barito Utara	-9.00%	6.00%	100.00%	9.00%	94.00%
2022	Kab Gunung mas	-5.00%	7.00%	34.00%	8.00%	96.00%
2022	Kota Palangkaraya	-9.00%	6.00%	-30.00%	19.00%	119.00%
2022	Kab Kutai Barat	35.00%	23.00%	-101.00%	5.00%	83.00%
2022	Kab Paser	-19.00%	14.00%	72.00%	10.00%	249.00%
2022	Kab Berau	-9.00%	-9.00%	-100.00%	20.00%	177.00%
2022	Kota Balikpapan	8.00%	10.00%	-77.00%	40.00%	96.00%
2022	Kab Nunukan	-14.00%	-8.00%	-100.00%	9.00%	98.00%
2022	Kota Tarakan	-5.00%	10.00%	-3.00%	15.00%	100.00%
2022	Kab Gorontalo	3.00%	-2.00%	100.00%	11.00%	118.00%
2022	Kab Bone Bolango	-11.00%	-7.00%	-101.00%	61.00%	107.00%
2022	Kota Gorontalo	-7.00%	20.00%	201.00%	33.00%	126.00%
2022	Kab Sinjay	-8.00%	-7.00%	-68.00%	12.00%	111.00%
2022	Kab Kepulauan Selayar	3.00%	11.00%	-100.00%	6.00%	123.00%
2022	Kab Soppeng	-2.00%	13.00%	26.00%	14.00%	115.00%
2022	Kab Takalar	18.00%	39.00%	123.00%	8.00%	129.00%
2022	Kab Wajo	-1.00%	-5.00%	-131.00%	12.00%	96.00%
2022	Kab Pare-Pare	5.00%	5.00%	-55.00%	24.00%	100.00%
2022	Kab Toraja Utara	3.00%	3.00%	-84.00%	5.00%	98.00%
2022	Kab Bone	-3.00%	15.00%	406.00%	10.00%	109.00%
2022	Kab Bulukumba	5.00%	14.00%	-100.00%	14.00%	98.00%
2022	Kab Gowa	-8.00%	7.00%	38.00%	18.00%	106.00%
2022	Kota Palopo	3.00%	6.00%	-45.00%	34.00%	94.00%
2022	Kab Buton Tengah	-9.00%	6.00%	-39.00%	3.00%	101.00%

2022	Kab Kolaka Timur	-9.00%	8.00%	31.00%	4.00%	138.00%
2022	Kab Buton Selatan	-11.00%	-17.00%	-113.00%	5.00%	88.00%
2022	Kab Buton	-16.00%	-26.00%	-105.00%	5.00%	94.00%
2022	Kab Muna	-3.00%	14.00%	116.00%	5.00%	96.00%
2022	Kab Konawe Selatan	-3.00%	31.00%	-1514.00%	30.00%	100.00%
2022	Kota Kendari	13.00%	29.00%	64.00%	30.00%	112.00%
2022	Kab Banggai	7.00%	15.00%	-61.00%	11.00%	100.00%
2022	Kab Buol	-9.00%	-6.00%	-85.00%	8.00%	98.00%
2022	Kab Toli-Toli	-2.00%	0.00%	-100.00%	3.00%	98.00%
2022	Kab Poso	-4.00%	-4.00%	-100.00%	11.00%	95.00%
2022	Kota Palu	-4.00%	-1.00%	-100.00%	27.00%	115.00%
2022	Kab Minahasa	0.00%	5.00%	-19.00%	8.00%	67.00%
2022	Kab Sangihe	-4.00%	7.00%	0.00%	3.00%	149.00%
2022	Kab Tomohon	-11.00%	9.00%	-7.00%	9.00%	117.00%
2022	Kab Minahasa Selatan	-2.00%	1.00%	100.00%	3.00%	103.00%
2022	Kab Kotamobagu	-4.00%	3.00%	0.00%	18.00%	101.00%
2022	Kota Manado	22.00%	46.00%	676.00%	30.00%	111.00%
2022	Kota Bitung	-8.00%	9.00%	-96.00%	30.00%	67.00%
2022	Kab Mamuju	4.00%	12.00%	100.00%	8.00%	102.00%
2022	Kab Mamasa	0.00%	20.00%	693.00%	9.00%	111.00%
2022	Kab Majene	-6.00%	-2.00%	-67.00%	9.00%	103.00%
2022	Kab Polewali Mandar	-4.00%	-3.00%	0.00%	16.00%	105.00%
2022	Kab Maluku Tengah	-4.00%	-4.00%	-70.00%	7.00%	103.00%
2022	Kab Buru	5.00%	6.00%	-50.00%	5.00%	99.00%
2022	Kab Buru Selatan	-12.00%	-7.00%	16.00%	3.00%	101.00%
2022	Kab Kepulauan Aru	6.00%	7.00%	4300.00%	4.00%	99.00%
2022	Kota Ambon	1.00%	1.00%	225.00%	19.00%	83.00%
2022	Kab Halmahera Tengah	44.00%	76.00%	-6611.00%	15.00%	99.00%
2022	Kab Tidore Kepulauan	-2.00%	6.00%	-36.00%	6.00%	101.00%
2022	Kab Halmahera Barat	4.00%	31.00%	-1848.00%	3.00%	119.00%
2022	Kota Ternate	5.00%	7.00%	0.00%	11.00%	97.00%
2022	Kab Mappi	9.00%	11.00%	-101.00%	6.00%	98.00%
2022	Kab Tolikara	7.00%	5.00%	-100.00%	2.00%	96.00%

2022	Kab Keerom	4.00%	10.00%	-58.00%	2.00%	102.00%
2022	Kab Yahukimo	8.00%	10.00%	100.00%	1.00%	70.00%
2022	Kab Yalimo	0.00%	5.00%	0.00%	0.00%	68.00%
2022	Kab Nduga	20.00%	7.00%	-149.00%	1.00%	99.00%
2022	Kab Lanny Jaya	18.00%	19.00%	0.00%	12.00%	105.00%
2022	Kab Jayapura	9.00%	9.00%	-59.00%	5.00%	124.00%
2022	Kab Jayawijaya	7.00%	17.00%	0.00%	6.00%	99.00%
2022	Kab Deiyai	10.00%	0.00%	-400.00%	2.00%	103.00%
2022	Kab Intan Jaya	0.00%	-3.00%	-100.00%	7.00%	98.00%
2022	Kab Biak Numfor	20.00%	18.00%	-44.00%	8.00%	95.00%
2022	Kota Jayapura	3.00%	1.00%	-87.00%	4.00%	102.00%
2022	Kab Fak-Fak	1.00%	10.00%	-29.00%	7.00%	100.00%
2022	Kab Manokwari	16.00%	8.00%	-82.00%	100.00%	100.00%
2022	Kab Sorong	-1.00%	0.00%	-90.00%	0.00%	95.00%
2022	Kab Pegunungan Arfak	16.00%	4.00%	-101.00%	1.00%	92.00%
2022	Kab Raja Ampat	17.00%	18.00%	-100.00%	10.00%	85.00%
2022	Kota Sorong	31.00%	15.00%	-891.00%	50.00%	92.00%

Lampiran 2. Deskripsi Variabel Penelitian

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Perubahan Pendapatan	896	-40.00%	47.00%	2.4074%	9.71564%
Perubahan Belanja	896	-36.00%	76.00%	8.4174%	11.64589%
Perubahan Pembiayaan	896	-73865.00%	6600.00%	-118.4163%	2718.93203%
Tingkat Kemandirian	896	0.00%	159.00%	17.4319%	18.49469%
Efisiensi Pengelolaan Keuangan	896	62.00%	249.00%	100.3828%	9.69995%
Valid N (listwise)	896				

Lampiran 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		896	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.06826620	
Most Extreme Differences	Absolute	.100	
	Positive	.100	
	Negative	-.086	
Test Statistic		.100	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.093 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.086
		Upper Bound	.100

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 926214481.

b. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	4.537	.028		164.803	.000		
Perubahan Pendapatan	-.023	.008	-.278	-2.926	.004	.666	1.502
Perubahan Belanja	.040	.010	.406	4.215	.000	.647	1.547
Perubahan Pembiayaan	-.003	.003	-.066	-.837	.404	.978	1.022

Tingkat Kemandirian	.009	.007	.106	1.331	.185	.951	1.052
---------------------	------	------	------	-------	------	------	-------

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.041	.020		2.080	.039
	Perubahan Pendapatan	.002	.006	.040	.398	.691
	Perubahan Belanja	.004	.007	.063	.617	.538
	Perubahan Pembiayaan	.001	.002	.039	.466	.642
	Tingkat Kemandirian	-.006	.005	-.107	-1.264	.208

a. Dependent Variable: Efisiensi

d. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.360 ^a	.130	.106	.06920%	1.994

a. Predictors: (Constant), Tingkat Kemandirian, Perubahan Pendapatan, Perubahan Belanja

b. Dependent Variable: Efisiensi Pengelolaan Keuangan

Lampiran 4. Hasil Uji Hipotesis

a. Hasil Uji Regresi

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	100.140	.180		556.331	.000
	Perubahan Pendapatan	-.314	.017	-.673	-19.036	.000
	Perubahan Belanja	.265	.014	.679	18.951	.000
	Perubahan Pembiayaan	.009	.007	.106	1.331	.185
	Tingkat Kemandirian	-.070	.006	-.299	-10.980	.000

a. Dependent Variable: Efisiensi Pengelolaan Keuangan

b. Hasil Uji F

		ANOVA^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6786.411	4	1357.282	15.587	.000 ^b
	Residual	77410.186	892	87.076		
	Total	84196.597	894			

a. Dependent Variable: Efisiensi Pengelolaan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Tingkat Kemandirian, Perubahan Pendapatan, Perubahan Belanja, Perubahan Pembiayaan

c. Hasil Uji R²

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.360 ^a	.130	.106	.06920

a. Predictors: (Constant), Tingkat Kemandirian, Perubahan Pendapatan, Perubahan Belanja

a. Dependent Variable: Efisiensi Pengelolaan Keuangan

d. Hasil Uji t

Model		Coefficients ^a				Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	100.140	.180		556.331	.000
	Perubahan Pendapatan	-.314	.017	-.673	-19.036	.000
	Perubahan Belanja	.265	.014	.679	18.951	.000
	Perubahan Pembiayaan	.009	.007	.106	1.331	.185
	Tingkat Kemandirian	-.070	.006	-.299	-10.980	.000

a. Dependent Variable: Efisiensi Pengelolaan Keuangan